

**PT HARTA DJAYA KARYA**

**LAPORAN KEUANGAN/  
FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL/  
FOR THE YEAR ENDED**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)/  
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 (UNAUDITED)**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/  
AND AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT**

**GIDEON ADI & REKAN**  
Registered Public Accountants

**PT HARTA DJAYA KARYA**

**LAPORAN KEUANGAN/  
FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL/  
FOR THE YEAR ENDED**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)/  
DECEMBER 31, 2020 AND 2019 (UNAUDITED)**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/  
AND AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT**

---

	<u>Halaman/ Page</u>	
<b>Surat Pernyataan Direksi</b>		<b>Director's Statement Letter</b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>		<b>Auditor's Independent Report</b>
<b>Laporan Keuangan</b>		<b>Financial Statements</b>
Neraca	1 - 2	<i>Balance Sheet</i>
Laporan Laba Rugi	3	<i>Statements of Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6 – 61	<i>Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN UNTUK YANG  
BERAKHIR PADA  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
PT. HARTA DJAYA KARYA**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER  
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE  
FINANCIAL STATEMENTS AND FOR THE  
YEARS ENDED  
DECEMBER, 31, 2020 AND 2019  
PT. HARTA DJAYA KARYA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Richie Adrian Hartanto  
Alamat sesuai ktp : Jl. Sawo Manila No.19 RT 008 RW  
011, Jatipadang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Bintaro Raya No. 8A, Kebayoran  
Lama Selatan, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta  
Jabatan : Direktur

*We, the undersigned :*

Name : Richie Adrian Hartanto  
Domicile Address : Jl. Sawo Manila No.19 RT 008 RW 011,  
Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta  
Selatan  
Office Address : Jl.Bintaro Raya No. 8A, Kebayoran  
Lama Selatan, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta  
Position : President Director

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Harta Djaya Karya (Entitas)
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar  
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan.

*State that:*

1. We are responsible for preparation and presentation of the financial statements of PT. Harta Djaya Karya (Entity)
2. The financial statements of the entity have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information contained in the Financial statements of the entity is complete and correct.  
b. The financial statements of the entity do not contain misleading material information or facts and does not omit material information or facts.
4. We are responsible for the internal control system of the Entity.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta Selatan, 2 Maret 2023 / South Jakarta, 2 March 2023

Direktur utama / President Director,

  
METERAI TEMPEL  
C-E-SAKX399008579  
**HARTA DJAYA KARYA**  
Richie Adrian Hartanto

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
Jl. Bintaro Raya No.8A, Kby. Lama Sel,  
Jakarta Selatan, 12240 Tlp: (021) 27937979 Fax : (021) 29721295

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Laporan No.  
**00087/3.0329/AU.1/05/1583-1/1/III/2023**

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan  
Direksi

**PT. Harta Djaya Karya**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. Harta Djaya Karya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami

**AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT**

Report No.  
**00087/3.0329/AU.1/05/1583-1/1/III/2023**

*The Stockholders, Board of Commissioners  
and Directors*

**PT. Harta Djaya Karya**

*We have audited the accompanying financial statements of PT Harta Djaya Karya, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Management's responsibility for the financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit.*



00087/3.0329/AU.1/05/1583-1/1/III/2023  
(Lanjutan)

**Tanggung jawab auditor (Lanjutan)**

Kami melaksanakan audit kami berdasar kan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

00087/3.0329/AU.1/05/1583-1/1/III/2023  
(Continued)

**Auditors' responsibility (Continued)**

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

00087/3.0329/AU.1/05/1583-1/1/III/2023  
(Lanjutan)

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Harta Djaya Karya tanggal 31 Desember 2020, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Penekanan Suatu Hal**

Kami membawa perhatian saudara kepada catatan atas laporan keuangan nomor 25 tentang Penyajian Kembali Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Penyajian kembali laporan keuangan dilakukan karena terdapat perubahan Standar Akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan. Dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK). Penyajian kembali atas laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan Surat nomor 013/HDK/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022

00087/3.0329/AU.1/05/1583-1/1/III/2023  
(Continued)

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements fairly present, in all material respects, the financial position of PT Harta Djaya Karya as of December 31, 2020, and its results of operations and cash flows, for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards*

**Emphasis Of Matter**

*We bring to your attention the notes to the financial statements number 25 regarding the Restatement of Financial Statements for the year ended December 31, 2020. The restatement of the financial statements was made due to changes in the Accounting Standards used by the Company. From Standards for Financial Accounting for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) to Standards for Financial Accounting in Indonesia (SAK). The restatement of the financial statements is carried out based on Letter number 013/HDK/XII/2022 dated December 01, 2022*



00087/3.0329/AU.1/05/1583-1/1/III/2023  
(Lanjutan)

**Hal Lain**

Laporan keuangan PT Harta Djaya Karya 31 Desember 2020 sebelum penyajian kembali telah diaudit oleh Auditor Independen lain dengan nomor 00588/2.1047/AU.2/05/1166-1/1/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian

00087/3.0329/AU.1/05/1583-1/1/III/2023  
(Continued)

**Other Matter**

The financial statements of PT Harta Djaya Karya as of December 31, 2020 before being restated have been audited by other Independent Auditor number 00588/2.1047/AU.2/05/1166-1/1/VII/2021 dated July 30, 2021 which express a Unqualified Opinion

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK/ REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
GIDEON ADI & REKAN**

**Riski Firmansyah, CPA**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1583  
Public Accountant Licence Number AP. 1583

Surabaya, 02 Maret 2023/ March 02, 2023





**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Tidak Diaudit)**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**DECEMBER 31, 2020, AND 2019 (Unaudited)**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ Notes	2020	2019 Tidak diaudit/ Unaudited	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan bank	2e, 5	919.807.215	793.651.749	<i>Cash on hand and in banks</i>
Piutang usaha				<i>Trade receivables</i>
Pihak ketiga	2f, 6	495.010.000	1.464.306.694	<i>Third parties</i>
Piutang lain-lain -				<i>Other receivables -</i>
Pihak ketiga	2f, 7	10.676.013.813	9.765.832.908	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	2f, 7	432.481.098	-	<i>Related parties</i>
Biaya dibayar dimuka	2h, 8	35.550.000	264.892.000	<i>Prepaid expense</i>
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>12.558.862.126</b>	<b>12.288.683.351</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset pajak tangguhan	2l, 3h, 24c	73.820.780	47.792.580	<i>Deffered tax assets</i>
Aset hak guna	2n, 9	82.083.335	-	<i>Right of used assets</i>
Aset tetap - neto	2i, 3c, 10	628.099.735	179.545.158	<i>Fixed assets – net</i>
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>784.003.850</b>	<b>227.337.738</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>13.342.865.976</b>	<b>12.516.021.089</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Tidak Diaudit)**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**DECEMBER 31, 2020, AND 2019 (Unaudited)**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ Notes	2020	2019 Tidak diaudit/ Unaudited	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang bank jangka pendek	2c, 11	6.376.968.924	5.568.292.301	<i>Short term bank loan</i>
Utang usaha				<i>Trade payables</i>
Pihak ketiga	2c, 12	353.323.650	791.705.411	<i>Third parties</i>
Utang pajak	2l, 3, 24a	375.857.943	741.984.481	<i>Taxes payable</i>
Beban yang masih harus dibayar	2h, 13	-	100.156.470	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				<i>Current portion of long-term liabilities</i>
Lembaga keuangan bukan bank	14	2.887.860.839	2.491.000.000	<i>Financial institution non bank</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>9.994.011.356</b>	<b>9.693.138.663</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas jangka panjang dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				<i>Long-term liabilities – less current portion</i>
Lembaga keuangan bukan bank	14	60.559.142	-	<i>Financial institution non bank</i>
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	2m, 3e, 15	335.549.000	217.239.000	<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>396.108.142</b>	<b>217.239.000</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>10.390.119.498</b>	<b>9.910.377.663</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				<i>Capital stock – par value Rp 1.000.000 per share</i>
Modal dasar – 4.000 saham				<i>Authorized – 4,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.000 saham pada tahun 2020 dan 2019	16	2.000.000.000	2.000.000.000	<i>Issued and fully paid – 2,000 shares in 2020 and 2019</i>
Saldo laba		952.746.478	605.643.426	<i>Retained earnings</i>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>2.952.746.478</b>	<b>2.605.643.426</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>13.342.865.976</b>	<b>12.516.021.089</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Tidak diaudit)**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS**  
**AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2020 AND 2019 (Unaudited)**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ Notes	2020	2019 Tidak diaudit/ Unaudited	
<b>PENDAPATAN</b>	2k, 17	7.794.110.663	7.395.195.618	<b>REVENUE</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	2k, 18	(4.348.116.030)	(4.196.568.617)	<b>COST OF GOODS SOLD</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>3.445.994.633</b>	<b>3.198.627.001</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Pendapatan lain-lain	2k, 20	949.070.057	651.643.355	<i>Other income</i>
Beban penjualan	2k, 21	(307.173.308)	(364.178.251)	<i>Selling expenses</i>
Beban umum dan administrasi	2k, 19	(2.132.783.868)	(1.982.771.524)	<i>General and administrative expenses</i>
Beban lain-lain	2k, 22	(1.287.502.809)	(758.618.737)	<i>Other expenses</i>
<b>LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK</b>		<b>667.604.705</b>	<b>744.701.844</b>	<b>INCOME BEFORE PROVISION FOR TAX EXPENSE</b>
<b>TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK</b>	2l,24	(320.501.653)	(261.712.890)	<b>PROVISION FOR TAX INCOME (EXPENSE)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>347.103.052</b>	<b>482.988.954</b>	<b>GAIN FOR THE YEAR</b>
<b>POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>				<b>ITEMS NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:</b>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	2, 15	-	-	<i>Actuarial gain (loss)</i>
Pajak penghasilan terkait		-	-	<i>Related income tax</i>
<b>JUMLAH POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI</b>		-	-	<b>TOTAL ITEMS NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>347.103.052</b>	<b>482.988.954</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Tidak diaudit)**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2020 AND 2019 (Unaudited)**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital</b>	<b>Saldo Laba/ Retained Earnings</b>	<b>Komponen Ekuitas Lainnya/Other Equity Component</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	
<b>Saldo per 1 Januari 2019</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>122.654.472</b>	<b>-</b>	<b>2.122.654.472</b>	<b>Balance as of January 1, 2019</b>
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan (Tidak diaudit)	-	482.988.954	-	482.988.954	<i>Comprehensive income (loss) for the year (Unaudited)</i>
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>605.643.426</b>	<b>-</b>	<b>2.605.643.426</b>	<b>Balance as of December 31, 2019</b>
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	-	347.103.052	-	347.103.052	<i>Comprehensive income (loss) for the year</i>
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>952.746.478</b>	<b>-</b>	<b>2.952.746.478</b>	<b>Balance as of December 31, 2020</b>

4 *Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

*The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements*



**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019 '(Tidak diaudit)**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2020 AND 2019 (Unaudited)**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	2020	2019 Tidak diaudit/ Unaudited	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Laba sebelum pajak	667.604.705	744.701.844	<i>Profit before tax</i>
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi			<i>Adjustments to reconcile income (loss) before provision for tax income (expense) to net cash provided by (used in) operating activities</i>
Cadangan penurunan nilai piutang	367.400.000	-	<i>Allowance for impairment</i>
Penyusutan	58.121.797	23.311.851	<i>Depreciation</i>
Imbalan kerja	118.310.000	217.239.000	<i>Employee benefits</i>
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	1.211.436.502	985.252.695	<i>Operating profit before changes in working capital</i>
<u>Penurunan (kenaikan)</u>			<u><i>Decrease (Increase)</i></u>
Piutang usaha	601.896.694	444.753.625	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	(652.066.265)	(1.002.995.744)	<i>Other receivables</i>
Biaya dibayar dimuka	229.342.000	161.213.132	<i>Prepaid expense</i>
Aset hak guna	(82.083.335)	-	<i>Right of used assets</i>
<u>Kenaikan (Penurunan)</u>			<u><i>Increase (Decrease)</i></u>
Utang usaha	(438.381.761)	61.227.569	<i>Trade payables</i>
Utang lain-lain	(100.156.470)	83.493.470	<i>Other payables</i>
Utang pajak	(712.656.391)	12.267.753	<i>Taxes payable</i>
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>57.330.974</b>	<b>745.212.500</b>	<b>Net Cash Provided by Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penambahan piutang lain-lain	(690.595.738)	(6.374.522.521)	<i>Addition of other receivables</i>
Pembelian aset tetap	(506.676.375)	(195.067.406)	<i>Purchased of fixed asset</i>
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(1.197.272.112)</b>	<b>(6.569.589.927)</b>	<b>Net Cash Used in Investing Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penambahan (pembayaran) utang bank	808.676.623	(756.302.780)	<i>Addition (payment) bank loan</i>
Penambahan utang jangka panjang	457.419.981	2.491.000.000	<i>Addition non current liabilities</i>
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>1.266.096.604</b>	<b>1.734.697.220</b>	<b>Net Cash Provided by Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>126.155.466</b>	<b>(4.089.680.207)</b>	<b>INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>793.651.749</b>	<b>4.883.331.956</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>919.807.215</b>	<b>793.651.749</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

**1. UMUM**

**a. Pendirian Entitas**

PT Harta Djaya Karya (Entitas) didirikan berdasarkan Akta Notaris Musa Muamarta., S.H., No. 27, tanggal 22 November 2012. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0111407.AH.01.09. Tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Dini Lastari Siburian, S.H., No. 43, tanggal 26 Mei 2017, Sehubungan dengan rencana penawaran umum saham entitas. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0068276.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 29 Mei 2017.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup kegiatan Entitas terutama bergerak dalam bidang pengembang, jasa design interior dan perdagangan. Entitas mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012.

Entitas berdomisili di Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Kantor pusat Entitas beralamat di Jl. Bintaro Raya No. 8A, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240.

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020 / 2019
<b><u>Komisaris</u></b> Komisaris	Rama Permana
<b><u>Direksi</u></b> Direktur utama	Richie Adrian Hartanto

Jumlah karyawan Entitas adalah 26 orang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. (Tidak diaudit)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**1. GENERAL**

**a. The Entity's Establishment**

*PT Harta Djaya Karya (the Entity) was established based on the Notarial Deed of Musa Muamarta., S.H., No. 27, dated November 22, 2012. The establishment deed had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decision Letter No. AHU-0111407.AH.01.09. Tahun 2012, dated December 26, 2012.*

*The Entity's Articles of Association have been amended several times, the last with Notarial Deed by Dini Lastari Siburian, S.H., No. 43, dated May 26, 2017, in connection with the entity's planned public offering of shares. This notarial deed had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decision Letter No. AHU - 0068276.AH.01.11 year 2017, dated May 29, 2017.*

*In accordance with Article 3 of the Entity's Articles of Association, the scope of activities of the Entity is mainly to engage in the field of developer, interior design service and trading. The Entity started its commercial operations on 2012.*

*The Entity is domiciled in Kebayoran Lama Selatan, South Jakarta. The Entity's head office is located at Jl. Bintaro Raya No. 8A, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240.*

**b. The Board of Commissioners, Directors and Employees**

*The members of the Entity's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:*

	2020 / 2019
<b><u>Commissioners</u></b> Commissoners	Rama Permana
<b><u>Directors</u></b> President Director	Richie Adrian Hartanto

*The Entity has 26 permanent employees as of December 31, 2020 and 2019. (unaudited)*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Statement of Compliance**

*Management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements, and have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) which include Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute.*

**b. Basis of Preparation of Financial Statements**

*The financial statements except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)**

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp).

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Penerapan dari amandemen, penyesuaian dan interpretasi standar berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan efek material terhadap laporan keuangan:

- PSAK No. 1 (Amandemen dan Penyesuaian Tahunan 2019), mengenai "Penyajian Laporan Keuangan: tentang Judul Laporan Keuangan dan Definisi Material" dan PSAK No. 25 (Amandemen 2019), mengenai "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: tentang Definisi Material".

Amandemen tersebut memungkinkan entitas untuk menggunakan judul untuk laporan selain yang digunakan dalam PSAK No. 1. Misalnya, Entitas dapat menggunakan judul "Laporan Laba Rugi Komprehensif" alih-alih "Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain".

Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan tergantung pada sifat atau besarnya informasi. Entitas perlu menilai apakah informasi tersebut, baik secara individu atau kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan. Salah satu informasi adalah material jika diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

Penyesuaian Tahunan 2019 untuk PSAK No. 1, mengenai "Penyajian Laporan Keuangan" memperjelas beberapa kata dalam standar untuk menyelaraskan dengan intensi pada IAS No. 1.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**b. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)**

*Historical costs are generally based on the fair value of the benefits given in exchange for goods and services.*

*Fair value is the price that will be received to sell an asset or the price that will be paid to transfer a liability in a regular transaction between market participants on the measurement date.*

*The statements of cash flows were presented using the indirect method, by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.*

*The functional and presentation currently used in the financial statements is Indonesian Rupiah (Rp).*

*The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Entity' accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.*

*The implementation of the amendment, improvement and interpretations standards which are effective on January 1, 2020 did not result in significant changes to the accounting policies of the Entity and no material effect on the financial statements:*

- *PSAK No. 1 (Amendment and Annual Improvement 2019), regarding "Presentation of Financial Statements: Title of Financial Statements and Definition of Material" and PSAK No. 25 (Amendment 2019), regarding "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Material".*

*The amendment allows the Entity to use titles for the statements other than those used in PSAK No. 1. For example, an Entity may use the title "Statement of Comprehensive Income" instead of "Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income".*

*The amendment clarifies that materiality will depend on the nature or magnitude of information. An Entity will need to assess whether the information, either individually or in combination with other information, is material in the context of the financial statements. A misstatement of information is material if it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users.*

*The Annual Improvements 2019 to PSAK No. 1, regarding "Presentation of Financial Statements" clarify some wordings in the standard to align with the intention in IAS No. 1.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)**

- PSAK No. 15 (Amandemen 2017), mengenai "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

Amandemen ini menambahkan paragraf 14A untuk mengatur bahwa Entitas juga menerapkan PSAK No. 71 atas instrumen keuangan pada Entitas Asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto Entitas pada Entitas Asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 15 paragraf 38.

- ISAK No. 35, mengenai "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba".

ISAK No. 35 merupakan interpretasi dari PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 5 yang memberikan contoh bagaimana Entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.

- ISAK No. 36, mengenai "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK No. 16: Aset Tetap dan PSAK No. 73: Sewa".

ISAK No. 36 memberikan penegasan atas intensi dan pertimbangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Institut Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) mengenai perlakuan akuntansi atas hak atas tanah yang bersifat sekunder. ISAK No. 36 mengatur mengenai: (i) penilaian dalam menentukan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah; (ii) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK No. 16; dan (iii) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK No. 73.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Entitas telah menerapkan standar berikut ini dan ketentuan transisi terkait serta kebijakan praktisnya:

- PSAK No. 71 (Amandemen 2020), mengenai "Instrumen Keuangan".

Entitas memilih untuk tidak menyajikan kembali informasi komparatif pada saat penerapan awal PSAK No. 71. Dampak dari penerapan awal PSAK No. 71 diakui pada tanggal penerapan awal.

- PSAK No. 72, mengenai "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Entitas tidak menyajikan kembali perbandingan untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar. Dampak dari penerapan awal PSAK No. 72 diakui pada tanggal penerapan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**b. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)**

- PSAK No. 15 (Amendment 2017), regarding "Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures".

*This amendment adds paragraph 14A to regulate that the Entity also applies PSAK No. 71 on financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests which substantially form part of the Entity's net investment in associates or joint ventures as referred to in PSAK No. 15 paragraph 38.*

- ISAK No. 35, regarding "Presentation of Financial Statements of the Non-profit Oriented Entity".

*ISAK No. 35 is an interpretation of PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements paragraph 5 which provides an example of how a non-profit oriented Entity makes adjustments either: (i) adjusting the description used for certain items in the financial statements; and (ii) adjusting the description used for the financial statements themselves.*

- ISAK No. 36, regarding "Interpretation of the Interaction between Provisions Regarding Land Rights in PSAK No. 16: Fixed Assets and PSAK No. 73: Leases".

*ISAK No. 36 provides confirmation of the intentions and considerations of the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants Institute (DSAK-IAI) regarding the accounting treatment of land rights that are secondary in nature. ISAK No. 36 deals with: (i) valuation in determining the accounting treatment of land rights; (ii) accounting treatment related to land rights in accordance with PSAK No. 16; and (iii) accounting treatment related to land rights in accordance with PSAK No. 73.*

*On January 1, 2020, the Entity has implemented the following standards and their related transitional provisions and practical expedients:*

- PSAK No. 71 (Amendment 2020), regarding "Financial Instruments".

*The Entity opted not to restate the comparative information upon initial adoption of PSAK No. 71. The effect of initially applying PSAK No. 71 is recognized at the date of initial application.*

- PSAK No. 72, regarding "Revenue from Contracts with Customers".

*The Entity has not restated comparatives for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard. The effect of initially applying PSAK No. 72 is recognized at the date of initial application.*



**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)**

Entitas tidak telah menerapkan PSAK No. 72 menggunakan metode retrospektif modifikasian dengan efek kumulatif dari penerapan pertama kali standar ini diakui pada tanggal penerapan awal (1 Januari 2020) sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba. Oleh karena itu, informasi komparatif tidak disajikan kembali dan tetap dilaporkan berdasarkan PSAK No. 34, PSAK No. 23 dan Interpretasi terkait.

- PSAK No. 73 (Amandemen 2020), mengenai "Sewa".

Entitas tidak menyajikan kembali perbandingan untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Dalam menerapkan PSAK No. 73 untuk pertama kalinya, Entitas menggunakan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- mengakui liabilitas sewa sebesar nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Entitas pada tanggal penerapan awal.
- mengakui aset hak guna sejumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa yang dibayar di muka atau yang masih harus dibayar terkait dengan sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan segera sebelum tanggal penerapan awal.
- penggunaan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup mirip.
- sewa operasi dengan sisa jangka waktu sewa kurang dari 12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek.
- pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal.
- penggunaan peninjauan kembali dalam menentukan jangka waktu sewa di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa.
- tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa yang di sewa berdasarkan kelas aset yang mendasari.
- mengandalkan penilaian apakah sewa tersebut memberatkan berdasarkan PSAK No. 57, mengenai "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan penelaahan penurunan nilai.

Dampak penerapan atas PSAK No. 71, 72 dan 73 tersebut disajikan pada Catatan 4.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**b. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)**

*The Entity has not applied PSAK No. 72 using a modified retrospective method with the cumulative effect of initial recognition of this standard at the date of initial application (January 1, 2020) as an adjustment to the opening balance of retained earnings. Therefore, the comparative information was not restated and continues to be reported under PSAK No. 34, PSAK No. 23 and the related Interpretations.*

- *PSAK No. 73 (Amendment 2020), regarding "Leases"*

*The Entity has not restated comparatives for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.*

*In applying PSAK No. 73 for the first time, the Entity used the following practical expedients permitted by the standard:*

- *recognize lease liability at the present value of the remaining lease payments discounted using the Entity's incremental borrowing rate at the date of initial application.*
- *recognize right-of-use asset at an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognised in the statement of financial position immediately before the date of initial application.*
- *the use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics.*
- *operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as of January 1, 2020 are treated as short-term lease.*
- *the exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application.*
- *the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease.*
- *not to separate non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets.*
- *rely on the assessment of whether leases are onerous based on PSAK No. 57, regarding "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately before the date of initial application as an alternative to perform an impairment review.*

*The impact of the application of PSAK No. 71, 72 and 73 are presented in Note 4.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**c. Instrumen Keuangan**

Entitas melakukan penerapan PSAK No. 71, mengenai "Instrumen Keuangan".

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Entitas menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Entitas menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari de minimis atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian Model Bisnis

Entitas menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Entitas mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**c. Financial Instrument**

*The Entity have applied PSAK No. 71, regarding "Financial Instruments".*

*A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.*

Financial Assets

Initial Recognition

*Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest (SPPI).*

*Financial assets are classified in the three categories as follows:*

1. *Financial assets measured at amortized cost;*
2. *Financial assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL); and*
3. *Financial assets measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI).*

SPPI Test

*As a first step of its classification process, the Entity assess the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.*

*Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/discount).*

*The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Entity apply judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.*

*In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as FVTPL.*

Business Model Assessment

*The Entity determine its business model at the level that best reflects how it manages the Entity's financial assets to achieve its business objective.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**c. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Model bisnis Entitas tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Entitas.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Entitas tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian Penurunan Nilai".

Kecuali piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang diterapkan oleh Entitas secara praktis. Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**c. Financial Instrument (continued)**

*The Entity business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:*

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the Entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Entity's assessment.*

*The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from original expectations, the Entity does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.*

*Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments (SPPI) of the amount owed.*

*At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.*

*Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statement of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is recognized in the financial statements as "Impairment Loss".*

*With the exception of trade and other receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity has applied the practical expedient. All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**c. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau dimana Entitas menerapkan kebijaksanaan praktisnya diukur pada harga transaksi sebagaimana diungkapkan dalam "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**Metode suku bunga efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**c. Financial Instrument (continued)**

*Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity have applied the practical expedient are measured at the transaction price as disclosed in "Revenue from Contracts with Customers".*

*Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months from end of reporting period, otherwise they are classified as non-current.*

**Subsequent Measurement**

*The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:*

- i) *Financial assets that are measured at fair value through profit or loss*

*Financial assets measured at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the statements of profit or loss and other comprehensive income. The losses arising from impairment are also recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

**Effective interest rate method**

*The effective interest rate method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.*

*Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments measured at FVTPL.*

*As of December 31, 2020 and 2019, financial assets measured at amortized cost consist of cash on hand and cash in banks, trade receivables, and other receivables.*



**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**c. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dividen atas investasi diakui sebagai "Pendapatan Operasional Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika hak pembayaran telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Keuntungan dan kerugian dari nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga, kerugian penurunan nilai atau pembalikan, dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dari investasi dihitung menggunakan metode EIR. Ketika instrumen hutang dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk transaksi aset keuangan sebelum tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Sebelum tanggal 1 Januari 2020, Entitas mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**c. Financial Instrument (continued)**

- ii) *Financial assets measured at FVTPL*

*Financial assets measured at FVTPL are subsequently carried in the statements of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*Dividends on investments are recognized as "Other Operating Income" in the statements of profit or loss and other comprehensive income when the right of payment has been established.*

*As of December 31, 2020 and 2019, the Entity has no financial assets measured at FVTPL.*

- iii) *Financial assets measured at FVOCI*

*Fair value gains and losses are recognized in other comprehensive income. Interest income, impairment losses or reversals, and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss. Interest earned on investments is calculated using the EIR method. When debt instrument is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.*

*As of December 31, 2020 and 2019, the Entity have no financial assets measured at FVOCI.*

*Accounting policies applied for financial assets before January 1, 2020 are as follows:*

*Before January 1, 2020, the Entity classified their financial assets into these categories: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) loans and receivables, (c) financial assets held to maturity, and (d) financial assets available for sale. The classification depends on the purpose of acquiring such financial assets. Management determines the classification of such financial assets at the initial recognition.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**c. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Keuangan". Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Kerugian Penurunan Nilai".

Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
2. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Entitas menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan setelah periode pelaporan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**c. Financial Instrument (continued)**

*At the time of initial recognition, loans and receivables are recognized at their fair value plus transaction fees and are further measured on amortized acquisition costs using the EIR method. Income from financial assets in the category of loans and receivables is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is reported as "Finance Income". In the event of impairment, impairment losses are reported as a deduction from the carrying value of the financial assets in loan and receivables and are recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income as "Impairment Loss".*

Financial Liabilities

Initial Recognition

*Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows:*

1. *Financial liabilities measured at amortized cost; and*
2. *Financial liabilities measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL).*

*The Entity determine the classification of financial liabilities at initial recognition.*

*Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.*

*Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months after the reporting period, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.*

Subsequent Measurement

*The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:*

- (i) *Financial liabilities measured at amortized cost*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**c. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang bank, utang usaha, beban masih harus dibayar, dan utang lembaga keuangan non bank.

- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Entitas yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**c. Financial Instrument (continued)**

*Financial liabilities measured at amortized cost are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

*Gains or losses are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.*

*As of December 31, 2020 and 2019, financial liabilities measured at amortized cost consist of short term bank loan, trade payables, accrued expenses, and non financial institution loan.*

- (ii) *Financial liabilities measured at FVTPL*

*Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition measured at fair value through profit or loss.*

*Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Entity that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK No. 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.*

*Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*As of December 31, 2020 and 2019, the Entity have no financial liabilities measured at FVTPL.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**c. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersih disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Entitas atau pihak lawan.

**Penurunan Nilai dari Aset Keuangan**

Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk transaksi penurunan nilai aset keuangan setelah tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Pada setiap periode pelaporan, Entitas menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Entitas menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Entitas membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Untuk piutang usaha dan piutang lain-lain, Entitas menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit yang diharapkan. Entitas mengakui penyisihan kerugian berdasarkan estimasi kerugian kredit seumur hidup pada setiap akhir periode pelaporan. Kerugian kredit yang diharapkan dari aset keuangan ini diperkirakan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kehilangan kredit historis Entitas, disesuaikan dengan faktor masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi, termasuk nilai waktu dari uang jika diperlukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**c. Financial Instrument (continued)**

**Offsetting of Financial Instruments**

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Entity or the counterparty.*

**Impairment of Financial Assets**

*Accounting policies applied for impairment of financial assets after January 1, 2020 are as follows:*

*At each reporting date, the Entity assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Entity use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Entity compare the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.*

*For trade and other receivable, the Entity apply a simplified approach in calculating expected credit losses. The Entity recognize a loss allowance based on lifetime expected credit losses at the end of each reporting period. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Entity's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment, including time value of money where appropriate.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**c. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Ketika risiko kredit pada instrumen keuangan yang mana kerugian kredit yang diharapkan seumur hidup telah diakui kemudian membaik, dan persyaratan untuk mengakui kerugian kredit yang diharapkan seumur hidup tidak lagi terpenuhi, maka cadangan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan 12-bulan yang diharapkan dari kerugian kredit pada periode pelaporan saat ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan sederhana.

Entitas mengakui rugi penurunan nilai (pembalikan) dalam laba rugi untuk semua aset keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan jumlah tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, di mana penyisihan kerugian diakui. dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan.

Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk transaksi penurunan nilai aset keuangan sebelum tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat dilihat dari pengalaman Entitas atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan pembayaran atas piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**c. Financial Instrument (continued)**

*When the credit risks on financial instruments for which lifetime expected credit losses have been recognized subsequently improves, and the requirement for recognizing lifetime expected credit losses is no longer met, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-months expected credit losses at the current reporting period, except for assets for which simplified approach was used.*

*The Entity recognize impairment loss (reversals) in profit or loss for all financial assets with corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investment in debt instruments that are measured at FVOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the statements of financial position.*

*Accounting policies applied for impairment of financial assets before January 1, 2020 are as follows:*

*Financial assets, other than those measured at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.*

*Objective evidence of impairment of financial assets could include:*

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganisation; or*
- *the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.*

*For certain categories of financial assets, such as receivables, the impairment value of assets are assessed individually. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables can be seen from the Entity's experiences of collecting payments in the past, increasing delays in receiving payments due from the average credit period, and also the observation of changes in national or local economic conditions that correlable with the failure of payment on the receivables.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**c. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

**Aset keuangan**

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Entitas telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Entitas telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Entitas secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

**Liabilitas keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**c. Financial Instrument (continued)**

*For financial assets measured at amortized cost, the amount of the impairment loss is the difference between the financial asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows which is discounted by using the financial asset's original effective interest rate.*

*The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, which the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

**Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities**

**Financial assets**

*A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Entity have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Entity have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Entity have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.*

**Financial liability**

*A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.*

*When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Entitas menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Entitas harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Pengukuran nilai wajar atas aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

c. Financial Instrument (continued)

Fair Value of Financial Instruments

The Entity measure financial instruments, including derivatives, at fair value at each statements of financial position date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset and liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Entity .

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Entity use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;



**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**c. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- Level 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Entitas menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Entitas telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Penyesuaian Risiko Kredit

Entitas melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Entitas terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**c. Financial Instrument (continued)**

- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on recurring basis, the Entity determine whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

For the purpose of fair value disclosures, the Entity have determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Credit Risk Adjustment

The Entity adjust the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Entity's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

**d. Transactions with Related Parties**

The Entity has transactions with entities that are regarded as having special relationships as defined by PSAK No. 7 (Revised 2015), regarding "Related Parties Disclosures".

Related parties represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
  - (i) has control or joint control over the reporting entity;
  - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
  - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
  - (i) the entity's and reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)**

- (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor, jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) entitas
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**e. Kas dan Bank**

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

**f. Piutang Usaha dan Piutang Lain**

Piutang diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Penurunan nilai piutang terjadi jika terdapat bukti objektif bahwa Entitas tidak mampu untuk menagih kembali jumlah piutang usaha sesuai dengan ketentuan yang ada. Jumlah pencadangan atas penurunan nilai adalah perbedaan antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga efektif. Jumlah pencadangan ini diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**d. Transactions with Related Parties (continued)**

- (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity, if the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (vii) a person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provided key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All balances and significant transactions with related parties, whether or not conducted under the normal terms and conditions similar to those transacted with parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

**e. Cash on hand and in Banks**

According to PSAK No. 2, regarding "Statements of Cash Flows", cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in bank, and time deposits with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash on hand and in banks are not pledged as collaterals for liabilities and others loans and not restricted.

**f. Trade Receivables and Other Receivables**

Receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment. An allowance for impairment loss of receivables is established when there is objective evidence that the Entity will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. The amount of the allowance is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. The amount of the allowance is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**g. Persediaan**

Sesuai dengan PSAK No. 14, mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*).

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Penyisihan atas persediaan usang atau penurunan nilai persediaan ditetapkan berdasarkan penelaahan berkala terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan

**h. Biaya Dibayar di Muka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

**i. Aset Tetap**

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Years
Peralatan Proyek	4
Kendaraan	4 - 8
Peralatan Kantor	4

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya konstruksi aset dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya provisi pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**g. Inventory**

According to PSAK No. 14, regarding "Inventories", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for inventory losses, obsolescence or decline in stock value, based on a review of the physical condition and inventory turnover.

**h. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

**i. Fixed Assets**

According with PSAK No. 16, regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Project Equipment
Vehicles
Office Equipment

Land rights are stated at cost and not depreciated. Special costs associated with the acquisition of land is initially recognized as part of the cost of land assets, while the cost of the extension of rights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the land rights or economic life, which ever is shorter.

The cost of the construction of assets is capitalized as construction in progress. Interest and other borrowing cost, such as fees on loans used in financing the construction of a qualifying assets, are capitalized up to the date when construction is completed. These costs are reclassified into fixed assets account when the construction or installation is complete. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

**j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

**k. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Beban**

Pada tanggal 1 Januari 2020, Entitas telah menerapkan PSAK No. 72 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Entitas membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

*Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective fixed assets account when completed and ready for use*

*Cost of repairs and maintenance is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant renewals and betterments are capitalized.*

*When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.*

**j. Impairment of Non-Financial Assets**

*At the end of each reporting period, the Entity reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.*

*If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.*

**k. Revenue from Contracts with Customer and Expenses**

*On January 1, 2020, the Entity have applied PSAK No. 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:*

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract that transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Entity estimate the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**k. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Beban (lanjutan)**

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Entitas memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Aset kontrak

Aset kontrak adalah hak untuk mendapatkan imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan. Jika Entitas melaksanakan dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, aset kontrak diakui untuk memperoleh imbalan yang bersyarat.

Liabilitas kontrak

Kewajiban kontrak adalah kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan dimana Entitas telah menerima imbalan (atau jumlah pembayaran jatuh tempo) dari pelanggan. Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Entitas mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, kewajiban kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Entitas melaksanakan kontraknya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**k. Revenue from Contracts with Customer and Expenses (continued)**

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Entity select an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price differs for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Contract asset

Contract asset is the right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. If the Entity perform by transferring of goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, a contract asset is recognized for earned consideration that is conditional.

Contract liabilities

Contract liabilities is the obligation to transfer goods or services to a customer for which the Entity have received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer. If a customer pays consideration before the Entity transfer goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognised as revenue when the Entity perform under the contract.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**k. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Beban (lanjutan)**

Entitas mempertimbangkan apakah ada janji lain dalam kontrak yang merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah yang perlu dialokasikan sebagian dari harga transaksi (misalnya jaminan, poin loyalitas pelanggan). Dalam menentukan harga transaksi untuk penjualan barang dagang, Entitas mempertimbangkan pengaruh dari pertimbangan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non tunai, dan imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan (jika ada).

**i. Pertimbangan variabel**

Jika imbalan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Entitas mengestimasi jumlah imbalan yang menjadi haknya sebagai imbalan atas pengalihan barang kepada pelanggan. Pertimbangan variabel diestimasi pada awal kontrak dan dibatasi hingga kemungkinan besar bahwa pembalikan pendapatan yang signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan pertimbangan variabel kemudian diselesaikan.

**ii. Komponen pembiayaan yang signifikan**

Entitas menerima pembayaran uang muka dari pelanggan tertentu untuk penjualan barang dagang dengan lead time produksi selama dua (2) tahun setelah penandatanganan kontrak penerimaan pembayaran. Terdapat komponen pembiayaan yang signifikan untuk kontrak-kontrak ini mengingat lamanya waktu antara pembayaran pelanggan dan pengiriman barang, serta tingkat bunga yang berlaku di pasar. Dengan demikian, harga transaksi untuk kontrak-kontrak ini didiskontokan, menggunakan tingkat bunga yang tersirat dalam kontrak (yaitu, tingkat bunga yang mendiskontokan harga jual tunai barang logam, baja dan besi holo sejumlah yang dibayarkan di muka). Tarif ini sepadan dengan tarif yang akan tercermin dalam transaksi pembiayaan terpisah antara Entitas dan pelanggan pada awal kontrak.

Entitas menerapkan kebijaksanaan praktis untuk uang muka jangka pendek yang diterima dari pelanggan. Artinya, jumlah imbalan yang dijanjikan tidak disesuaikan dengan pengaruh komponen pembiayaan yang signifikan jika jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan dan pembayarannya adalah 1 tahun atau kurang.

**iii. Pertimbangan non-cash**

Entitas mengestimasi nilai wajar dari imbalan nontunai dengan mengacu pada harga pasarnya. Jika nilai wajar tidak dapat diestimasi secara wajar, maka imbalan non tunai diukur secara tidak langsung dengan mengacu pada harga jual barang dagang yang berdiri sendiri.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**k. Revenue from Contracts with Customer and Expenses (continued)**

*The Entity consider whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated (e.g warranties, customer loyalty points). In determining the transaction price for the sale of goods, the Entity considers the effects of variable consideration, existence of significant financing component, noncash consideration, and consideration payable to the customer (if any).*

**i. Variable consideration**

*If the consideration in a contract includes a variable amount, the Entity estimates the amount of consideration to which it will be entitled in exchange for transferring the goods to the customer. The variable consideration is estimated at contract inception and constrained until it is highly probable that a significant revenue reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the associated uncertainty with the variable consideration is subsequently resolved.*

**ii. Significant financing component**

*The Entity receives advance payments from certain customers for the sale of goods with a manufacturing lead time of two (2) years after signing the contract receipt of payment. There is a significant financing component for these contracts considering the length of time between the customers' payment and the transfer of the goods, as well as the prevailing interest rate in the market. As such, the transaction price for these contracts is discounted, using the interest rate implicit in the contract (i.e., the interest rate that discounts the cash selling price of the metal goods, steel and iron holo to the amount paid in advance). This rate is commensurate with the rate that would be reflected in a separate financing transaction between the Entity and the customer at contract inception.*

*The Entity apply the practical expedient for short-term advances received from customer. That is, the promised amount of consideration is not adjusted for the effects of a significant financing component if the period between the transfer of the promised goods or services and the payment is one (1) year or less.*

**iii. Non-cash consideration**

*The Entity estimate the fair value of the non-cash consideration by reference to its market price. If the fair value cannot be reasonably estimated, the non-cash consideration is measured indirectly by reference to the stand-alone selling price of goods.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**k. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Beban (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk transaksi pendapatan sebelum tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Pendapatan harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepemilikan barang kepada pembeli;
- Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Entitas tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

Beban

Biaya dan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada bagian ekuitas. Beban diakui pada saat terjadinya.

**l. Pajak Penghasilan**

Entitas menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2018), mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**k. Revenue from Contracts with Customer and Expenses (continued)**

*Accounting policies applied for revenue before January 1, 2020 are as follows:*

*Revenue was measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue was reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.*

*Revenue was recognized when all of the following conditions were satisfied:*

- *The Entity has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;*
- *The Entity retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;*
- *The amount of revenue can be measured reliably;*
- *It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Entity; and*
- *The cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.*

Expenses

*Costs and expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or decreases of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants. Expenses are recognized when incurred.*

**l. Income Tax**

*The Entity adopted PSAK No. 46 (Revised 2018), regarding "Income Taxes", which requires the Entity to account for the tax consequences of current and future taxes over the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) recognized in the statement of financial position and transactions as well as other events that occurred in the current year are recognized in the financial statements.*

*Current tax expense is based on estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between assets and liabilities for commercial purposes and the tax bases of each reporting date. Future tax benefits, such as the value carried on the balance of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent the realization of such benefits is possible.*



**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**I. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

**m. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja**

Entitas mengakui program imbalan pasti.

Ketentuan program pensiun imbalan pasti menentukan jumlah pekerja yang akan menerima pada saat pensiun. Jumlah ini tergantung pada faktor-faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi, dan ditentukan secara independen dari utang kontribusi atau investasi skema. Kewajiban imbalan pasti diakui pada laporan posisi keuangan adalah perbedaan antara nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program.

Kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Keuntungan dan kerugian aktuaris diakui secara penuh pada tahun saat terjadinya pada bagian ekuitas di penghasilan komprehensif lain.

**n. Sewa**

Pada tanggal 1 Januari 2020, Entitas melakukan penerapan PSAK No. 73, mengenai "Sewa", yang mensyaratkan pengakuan hak aset sewa dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Entitas menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Entitas harus menilai apakah:

- Entitas memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**I. Income Tax (continued)**

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statements of financial position date.*

*Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates charged to the current year, except for transactions that previously charged or credited to equity.*

*Changes to tax liabilities are recognized when the tax assessment is received or if the Entity appealed against, when the results of objection has been set*

**m. Estimated Liabilities for Employee Benefits**

*The Entity operates defined benefit plans.*

*The terms of the defined benefit pension plan define the amount that employees will receive on retirement. These amounts are dependent on factors such as age, years of service and compensation, and are determined independently of the contributions payable or the investments of the scheme. The defined benefit liability recognized on the statements of financial position is the difference between the present value of the defined benefit obligations and the fair value of plan assets.*

*The defined benefit obligation is calculated by independent actuary using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized in full in the year in which they occur within other to equity in other comprehensive income.*

**n. Leases**

*On January 1, 2020, the Entity have applied PSAK No. 73, regarding "Leases", which set the requirements for the recognition of right-of-use asset and lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'.*

*As a Lessee*

*At the inception of a contract, the Entity assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.*

*To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Entity shall assess whether:*

- *The Entity have the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**n. Sewa (lanjutan)**

- Entitas memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Entitas memiliki hak ini ketika mereka memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Entitas memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Entitas telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Entitas mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Entitas bertindak sebagai penyewa, Entitas memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

**i. Aset hak guna**

Pada tanggal permulaan sewa, Entitas mengakui aset hak-guna. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna aset selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa, sebagai berikut:

	Tahun/Years	
Bangunan	1-4	

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Entitas pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Entitas akan mengeksekusi opsi beli, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**n. Leases (continued)**

- *The Entity have the right to direct the use of the asset. The Entity have this right when they have the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
  1. *The Entity have the right to operate the asset;*
  2. *The Entity have designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

*At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Entity allocate the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the nonlease components. However, for the leases of improvements in which the Entity are a lessee, the Entity have elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.*

**i. Right-of-use assets**

*The Entity recognize a right-of-use asset at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial measurement of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to be incurred in dismantling and removing the underlying asset or to restore the underlying asset to the conditions required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.*

*Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.*

*The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term, as follows:*

*If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Entity by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Entity will exercise a purchase option, the Entity depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Entity depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**n. Sewa (lanjutan)**

Entitas menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Entitas menerapkan PSAK No. 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

**ii. Liabilitas sewa**

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Entitas menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Entitas cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode menggunakan metode suku bunga efektif.

Entitas menyajikan "Aset Hak Guna" sebagai bagian dari aset tetap dan "Liabilitas Sewa" terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

**Sewa Jangka Pendek**

Entitas memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Entitas mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**n. Leases (continued)**

*The Entity apply PSAK No. 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.*

*When a contract includes lease and non-lease components, the Entity apply PSAK No. 72 to allocate the consideration under the contract to each component.*

**ii. Lease liability**

*The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Entity use their incremental borrowing rate as the discount rate.*

*Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:*

- *fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantees;*
- *the exercise price of a purchase option if the Entity are reasonably certain to exercise that options; and*
- *payment of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising an option to terminate the lease.*

*Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period using the effective interest method.*

*The Entity present "Right-of-Use Assets" as part of fixed assets and "Lease liabilities" are presented separately in the financial position.*

**Short-term Leases**

*The Entity have elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Entity recognize the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**n. Sewa (lanjutan)**

**Modifikasi Sewa**

Entitas mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Entitas:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Entitas pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Entitas mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban Umum dan Administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**Sebagai Pesewa**

Ketika Entitas bertindak sebagai pesewa, Entitas mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa Entitas membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**n. Leases (continued)**

**Lease Modification**

The Entity account for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Entity:

- remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease;
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Entity's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Entity recognize any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease in profit or loss; and
- make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and Administrative Expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**As a Lessor**

When the Entity act as a lessor, they shall classify each of their leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Entity make an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**n. Sewa (lanjutan)**

Ketika Entitas adalah pesewa-antara, Entitas mencatat sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak yang terpisah. Subsewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Entitas dan Entitas Anak. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk transaksi sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal sewa. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Sebagai Lessee

Sewa pembiayaan di mana Entitas memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewa dan nilai kini pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan beban keuangan sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui pada biaya keuangan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Namun jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Entitas akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara estimasi umur manfaat aset dan masa sewa.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**n. Leases (continued)**

*When the Entity are an intermediate lessor, they account for the head lease and the subleases as two separate contracts. The sublease is classified as a finance or operating lease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease.*

*Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.*

*Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Entity's and Subsidiaries' net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Entity's and Subsidiaries' net investment outstanding in respect of the leases.*

*Accounting policies applied for leases before January 1, 2020 are as follows:*

*The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in the arrangement.*

As a Lessee

*A finance lease from which the Entity have all substantial risks and benefits incidental to ownership of the leased item, is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between reduction of the lease liability and finance charges as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized in financing cost in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Entity will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.*

*Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases.*

*Operating lease payments are recognized as an operating expense in the statement of profit or loss on a straight-line basis over the lease term.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)**

**n. Sewa (lanjutan)**

Sebagai Lessor

Sewa dimana Entitas tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Penghasilan sewa kontinjensi, jika ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Sewa dimana Entitas mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan dari aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Aset sewa diakui sebagai piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto.

**o. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Entitas pada periode pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa akhir tahun yang tidak disesuaikan diungkapkan dalam laporan keuangan pada saat material.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut.

**Estimasi dan Asumsi**

Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

**a. Estimasi provisi kerugian kredit ekspetasi dari piutang usaha dan piutang lain-lain.**

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Entitas menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Entitas dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Entitas menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

**n. Leases (continued)**

As a Lessor

A lease in which the Entity do not transfer substantially all the risks and benefits of the ownership of an asset is classified as an operating lease. Contingent rents, if any, are recognized as revenue in the period they are earned.

A lease in which the Entity transfer substantially all the risks and benefits of the ownership of an asset is classified as a finance lease. The leased asset is recognized as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease.

**o. Event After the Reporting Period**

Post year-end event that provide additional information about the Entity's position at reporting period (*adjusting event*) are reflected in the financial statements. Post year-ended events that are not adjusting event are disclosed in the financial statements when material.

**3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of financial statements requires management to make estimations and assumptions that affect assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from these estimations.

**The Estimated and Assumptions**

The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:

**a. Estimating provision for expected credit losses of trade and other receivables.**

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Entity use judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Entity's and' relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Entity's receivables to amounts that they expect to collect.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)**

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Entitas juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Entitas menerapkan pendekatan sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha, piutang lain-lain, dan investasi jangka pendek. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

**b. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan**

Penyisihan atas persediaan usang, jika ada, diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan tersebut. Entitas memiliki pengalaman dalam mengevaluasi persediaan dengan mempertimbangkan kegunaan dari persediaan tersebut. Entitas akan mengevaluasi dan menilai kondisi tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

Manajemen Entitas melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4-8 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

**3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (CONTINUED)**

*These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Entity also recognize a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.*

*The Entity apply simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade and other receivables, and short-term investment. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.*

**b. Allowance for Inventories Obsolescence**

*Allowance for inventories obsolescence, if any, is estimated based on fact and situation, including but not limited on, physical condition of inventory. The Entity have experiences in evaluating inventories with considering benefits from inventories. The Entity will evaluate and measure that condition at every reporting date.*

**c. Depreciation of Fixed Assets**

*The management of Entity reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.*

*Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or write down assets which technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.*

*The costs of fixed assets is depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets are 4-8 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Entity conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.*



**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)**

**d. Pajak Penghasilan**

Entitas beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

**e. Imbalan Kerja**

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas program pensiun dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

**f. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

**g. Pengukuran Nilai Wajar**

Sejumlah aset dan liabilitas yang termasuk ke dalam laporan keuangan Entitas memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar.

**3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (CONTINUED)**

**d. Income Taxes**

*The Entity operate under the tax regulations in Indonesia. Significant judgement is required in determining the provision for income taxes and value added taxes. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will recorded at the statements of profit or loss and other comprehensive income in the period in which such determination is made.*

**e. Employee Benefits**

*The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan pension and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.*

*Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.*

**f. Impairment of Non-Financial Assets**

*At the end of each reporting period, the Entity reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.*

*Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.*

*If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.*

**g. Fair Value Measurements**

*A number of assets and liabilities included in the Entity's financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.*

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)**

Pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dan non-keuangan Entitas memanfaatkan pasar input dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin. Input yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana input dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk item yang serupa (tidak disesuaikan).
- Level 2: Teknik penilaian untuk input yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain input level 1.
- Level 3: Teknik penilaian untuk input yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar).

Klasifikasi item menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari input yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar item tersebut. Transfer item antar level diakui pada periode saat terjadinya.

Jika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diukur berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas yang didiskontokan. Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan, diperlukan tingkat pertimbangan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan termasuk pertimbangan input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi terkait faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

**h. Pemulihan dari aset pajak tangguhan**

Entitas melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai tidak lagi memungkinkan di mana penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Entitas atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Entitas di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Entitas dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

**3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (CONTINUED)**

*The fair value measurement of the Entity's financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):*

- *Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted).*
- *Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs.*
- *Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data).*

*The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.*

*When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including discounted cash flow model. The inputs to these model are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair value. Judgement include considerations of inputs such as liquidity risks, credit risks and volatility. Changes in assumptions relating to these factors could affect the reported fair value of financial instruments.*

**h. Recoverability of deferred tax assets**

*The Entity reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Entity's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences and tax loss carried forward are based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period. This forecast is based on the Entity's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Entity will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.*

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)**

**i. Ketidakpastian kewajiban perpajakan**

Dalam situasi tertentu, Entitas tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Entitas menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK 46, "Pajak Penghasilan". Entitas membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui.

Entitas mencatat bunga dan denda atas pajak penghasilan kurang bayar, jika ada, pada beban pajak dan denda di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

**Pertimbangan Akuntansi Penting dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi Entitas**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas, manajemen telah membuat pertimbangan yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan :

1) Penilaian model bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan tergantung pada hasil model bisnis dan hanya untuk pembayaran pokok dan bunga. Entitas menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerja mereka diukur, risiko yang mempengaruhi kinerja aset dan bagaimana ini dikelola dan bagaimana manajer aset dikompensasi. Entitas memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasannya konsisten dengan tujuan bisnis tempat aset itu dimiliki.

Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Entitas mengenai apakah model bisnis yang dimiliki oleh aset keuangan yang tersisa terus sesuai dan jika tidak tepat apakah telah ada perubahan dalam model bisnis dan perubahan prospektif ke arah itu. klasifikasi aset tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

**3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (CONTINUED)**

**i. Uncertain tax exposure**

*In certain circumstances, the Entity may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities or recoverable amount of the claim for tax refund due to ongoing investigation by, or negotiation with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability or the recoverable amount of the claim for tax refund related to uncertain tax positions, the Entity apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and PSAK 46, "Income Taxes". The Entity make an analysis of all uncertain tax positions to determine if a tax liability for uncertain tax benefit or a provision for unrecoverable claim for tax refund should be recognized.*

*The Entity present interest and penalties for the underpayment of income tax, if any, in tax and fine expense in the statements profit or loss and other comprehensive income.*

**Significant Accounting Judgments in Applying the Entity Accounting Policies**

*In the process of applying the Entity's policies, management has made the following judgment, apart from those involving estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:*

1) *Business model assessment*

*Classification and measurement of financial assets depends on the result of the business model solely for payments of principal and interest (SPPI) test. The Entity determine the business model at a level that reflects how the group of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Entity monitor financial assets measured at amortized cost or FVOCI that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reason are consistent with the objective of the business for which the asset was held.*

*Monitoring is part of the Entity's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in the business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.*

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)**

2) Peningkatan risiko kredit yang signifikan

ECL diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL seumur hidup untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Sebuah aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK No. 71 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Entitas memperhitungkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif. Manajemen menilai tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

3) Perbedaan antara properti investasi dan properti yang ditempati pemilik

Entitas menentukan apakah suatu properti memenuhi syarat sebagai properti investasi. Dalam membuat pertimbangan, Entitas mempertimbangkan apakah properti tersebut menghasilkan arus kas yang sebagian besar terlepas dari aset lain yang dimiliki oleh suatu entitas. Properti yang ditempati sendiri menghasilkan arus kas yang dapat diatribusikan tidak hanya ke properti tetapi juga ke aset lain yang digunakan dalam proses produksi atau pasokan.

4) Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaruan dan penghentian - Lessee

Entitas menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika dipastikan secara wajar akan dilaksanakan, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika dipastikan tidak akan dilakukan secara wajar.

Entitas memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Entitas menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah cukup yakin apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa atau tidak. Artinya, ia mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Entitas menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendalinya dan memengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan (misalnya, konstruksi kontrak perbaikan hak milik yang signifikan atau penyesuaian yang signifikan pada aset yang disewakan).

**3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (CONTINUED)**

2) *Significant increase in credit risk*

*Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stages 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when credit risks has increased significantly since initial recognition. PSAK No. 71 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased, the Entity take into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information. Management assessed that there has no significant increase in credit risk on the Entity's financial assets for the years ended December 31, 2020 and 2019.*

3) *Distinction between investment properties and owner-occupied properties*

*The Entity determine whether a property qualifies as an investment property. In making its judgement, the Entity consider whether the property generates cash flow largely independent of the other assets held by an entity. Owner-occupied properties generate cash flows that are attributable not only to property but also to the other assets used in the production or supply process.*

4) *Determining the lease term of contract with renewal and termination option – Lessee*

*The Entity determine the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.*

*The Entity have several lease contracts that include extension and termination options. The Entity apply judgement in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate lease. That is, it consider all relevant factors that create an economic incentive for it to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Entity reassess the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate (e.g., construction of significant leasehold improvements or significant customization to the leased asset).*

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. DAMPAK PENERAPAN PSAK NO. 71, 72 DAN 73**

Pada tanggal 1 Januari 2020, Entitas telah menerapkan PSAK No. 71, 72 dan 73 untuk pertama kalinya.

Dampak terhadap laporan keuangan Entitas dari penerapan pertama kali dari PSAK No. 71, 72 dan 73 adalah sebagai berikut:

**PSAK No. 71 mengenai “Instrumen Keuangan”**

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK No. 55 dan klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK No. 71 pada tanggal 1 Januari 2020:

Catatan/Notes	Klasifikasi berdasarkan PSAK No. 55 31 Desember 2019/ Classification based on PSAK No.55 December 31, 2019	Klasifikasi berdasarkan PSAK No. 71 1 Januari 2020/ Classification based on PSAK No. 71 January 1, 2020	Saldo berdasarkan PSAK No. 55 31 Desember 2019/ Balance based on PSAK No. 55 December 31, 2019	Saldo berdasarkan PSAK No. 71 1 Januari 2020/ Balance based on PSAK No. 71 January 1, 2020
Aset keuangan/ Financial assets				
Piutang usaha/ Trade receivables	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Financial assets measured at amortized cost	1.464.306.694	1.464.306.694
Piutang lain-lain/ Other receivable	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Financial assets measured at amortized cost	9.765.832.908	9.765.832.908

**PSAK No. 72 mengenai “Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan”**

Berdasarkan hasil penelaahan dari manajemen, manajemen Entitas berkeyakinan bahwa penerapan PSAK No. 72 tidak berdampak terhadap laporan keuangan.

**PSAK No. 73 mengenai “Sewa”**

Berdasarkan hasil penelaahan dari manajemen, manajemen Entitas dan Entitas Anak, berkeyakinan bahwa penerapan PSAK No. 73 tidak berdampak terhadap laporan keuangan.

**4. IMPLEMENTATION IMPACT OF PSAK NO. 71, 72 AND 73**

On January 1, 2020, the Entity has applied PSAK No. 71, 72 and 73 for the first time.

The impact to the Entity’s financial statements for the first time adoption of PSAK No. 71, 72 and PSAK 73 are as follows:

**PSAK No. 71 regarding “Financial Statements”**

Classification of financial assets and liabilities

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to PSAK No. 55 and the new classification of financial assets and liabilities in accordance with PSAK No. 71 as of January 1, 2020:

**PSAK No. 72 regarding “Revenue from Contracts with Customers”**

Based on the review of management, the management of the Entity believes that the application of PSAK No.72 does not impact on the financial statements.

**PSAK No. 73 regarding “Leases”**

Based on the review of management, the management of the Entity and Subsidiaries, believes that the application of PSAK No.73 does not impact on the financial statements.

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. KAS DAN BANK**

Kas dan bank per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
<b>Kas</b>	543.900
<b>Bank :</b>	
<b>Rupiah</b>	
PT Bank Central Asia, Tbk	566.571.845
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	352.691.470
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>	<b>919.807.215</b>

Tidak terdapat saldo kas dan bank kepada pihak berelasi.

**6. PIUTANG USAHA**

Piutang usaha per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Kayu Raya Indonesia	367.400.000
PT XL Planet	294.260.000
British School Jakarta	90.750.000
Lain-lain	110.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>862.410.000</b>
<b>Penyisihan penurunan nilai</b>	<b>(367.400.000)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>495.010.000</b>

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
0-30 hari	404.260.000
31-60 hari	-
61-90 hari	-
91-360 hari	458.150.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>862.410.000</b>
<b>Penyisihan penurunan nilai</b>	<b>(367.400.000)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>495.010.000</b>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
Saldo awal	-
Penyisihan tahun berjalan (lihat catatan 23)	367.400.000
<b>Jumlah</b>	<b>367.400.000</b>

Piutang usaha tidak dijaminkan atas pinjaman dan tidak terdapat jaminan yang diterima Entitas atas piutang tersebut.

**5. CASH ON HAND AND IN BANKS**

Cash on hand and in banks as of December 31, 2020 and 2019 consist of:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
	886.900	<b>Cash on Hand</b>
		<b>Cash in Bank:</b>
		Indonesian Rupiah
		PT Bank Central Asia, Tbk
		PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
	779.499.893	
	13.264.956	
	<b>793.651.749</b>	<b>Total Cash On Hand and Cash In Bank</b>

There are no cash on hand and in banks to related parties

**6. TRADE RECEIVABLE**

Trade Receivable as of December 31, 2020 and 2019 consist of:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
	1.410.650.000	<b>Third-party</b>
	-	PT Kayu Raya Indonesia
	53.656.694	PT XL Planet
	-	British School Jakarta
	-	Others
	<b>1.464.306.694</b>	<b>Sub Total</b>
	-	<b>Allowance for impairment</b>
	<b>1.464.306.694</b>	<b>Total</b>

The aging of trade receivables are as follows:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
	1.464.306.694	0-30 days
	-	31-60 days
	-	61-90 days
	-	91-360 days
	<b>1.464.306.694</b>	<b>Sub Total</b>
	-	<b>Allowance for impairment</b>
	<b>1.464.306.694</b>	<b>Total</b>

Mutation of allowance for impairment losses are as follows:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
	-	Beginning balance
	-	Allowance for the year (see Note 23)
	-	<b>Total</b>

Trade receivables are not pledged as collateral for loans and there are no guarantees which are received by the Entity on the

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PIUTANG USAHA (LANJUTAN)**

Entitas menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha, manajemen Entitas berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagih piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020, sedangkan tidak terdapat bukti objektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai, oleh karena itu tidak ditentukan adanya penyisihan penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Piutang lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Pilar Karya Perkasa	6.721.928.817
Belly Ferdiansyah	2.035.682.687
Bunga pinjaman	1.594.046.210
Dr. Farm	222.210.700
Karyawan	102.145.399
Tommy Fredi Hasibuan	-
PT Matrixindo Multi Kreasi	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>10.676.013.813</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Mangkok Besar Cuan	432.481.098
<b>Sub Jumlah</b>	<b>432.481.098</b>
<b>Jumlah</b>	<b>11.108.494.911</b>

Piutang lain-lain tidak dijamin atas pinjaman dan tidak terdapat jaminan yang diterima Entitas atas piutang tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen Entitas berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif bahwa piutang lain-lain mengalami penurunan nilai, oleh karena itu tidak ditentukan adanya penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

Semua piutang lain-lain dalam mata uang Rupiah.

**8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

Rincian Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
Deposit	35.550.000
Sewa dibayar dimuka	-
<b>Jumlah biaya dibayar dimuka</b>	<b>35.550.000</b>

**6. TRADE RECEIVABLE (CONTINUED)**

The Entity apply the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Based on a review of the trade receivables, the Entity's management believe that the allowance for impairment losses on trade receivables is enough to cover possible losses from uncollectible accounts as of December 31, 2020 and there are no objective evidences of impairment, therefore no allowance for impairment of trade receivables as of December 31, 2019.

**7. OTHER RECEIVABLES**

Other receivables as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
		<i>Third parties</i>
	-	<i>PT Pilar Karya Perkasa</i>
	2.924.095.731	<i>Belly Ferdiansyah</i>
	647.945.744	<i>Interest loan</i>
	-	<i>Dr. Farm</i>
	396.179.600	<i>Employee</i>
	350.000.000	<i>Tommy Fredi Hasibuan</i>
	5.447.611.833	<i>PT Matrixindo Multi Kreasi</i>
	<b>9.765.832.908</b>	<b>Sub Total</b>
		<i>Related parties</i>
	-	<i>PT Mangkok Besar Cuan</i>
	-	<b>Sub Total</b>
	<b>9.765.832.908</b>	<b>Total</b>

Other receivables are not pledged as collateral for loans and there are no guarantees which are received by the Entity on the receivables.

Based on the review of other receivables as of December 31, 2020 and 2019, the Entity's management believe that there are no objective evidences of impairment, therefore no allowance for impairment of other receivables.

All other receivables are in Rupiah.

**8. PREPAID EXPENSE**

Details of Prepaid Expense as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
	214.892.000	<i>Deposits</i>
	50.000.000	<i>Prepaid rent</i>
	<b>264.892.000</b>	<b>Total prepaid expense</b>

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA (LANJUTAN)**

Pada tahun 2019, sewa dibayar di muka atas akun ini berkaitan dengan sewa dibayar di muka yang menerapkan kebijaksanaan praktis dalam PSAK No. 73, "sewa" yang mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2020.

**9. ASET HAK GUNA**

Akun ini merupakan sewa bangunan pada tanggal 31 Desember 2020.

**10. ASET TETAP**

Rincian aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**8. PREPAID EXPENSE (CONTINUED)**

In 2019, prepaid rent on this account pertains to leases paid in advance that applied the practical expedient in PSAK No. 73, "lease" which goes into effect on January 1, 2020.

**9. RIGHT OF USED ASSETS**

This account represent rent of buildings as of December 31, 2020.

**10. FIXED ASSETS**

Details of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 were as follows :

<b>31 Des 2020/Dec 31, 2020</b>				
	<b>Saldo awal/ Beginning balance</b>	<b>Penambahan/ Increase</b>	<b>Pengurangan/ Decrease</b>	<b>Saldo akhir/ Ending balance</b>
<b>Harga perolehan/ Acquisition cost</b>				
Peralatan Proyek / Projects Equipments	17.446.782	10.817.500	-	28.264.282
Peralatan Kantor / Office Equipments	155.370.624	321.493.875	-	476.864.499
Kendaraan/ Vehicles	59.533.000	174.365.000	-	233.898.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>232.350.406</b>	<b>506.676.375</b>	<b>-</b>	<b>739.026.781</b>
<b>Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation</b>				
Peralatan Proyek / Projects Equipments	1.077.345	5.713.883	-	6.791.228
Peralatan Kantor / Office Equipments	15.781.507	37.242.352	-	53.023.859
Kendaraan/ Vehicle	35.946.396	15.165.563	-	51.111.959
<b>Jumlah / Total</b>	<b>52.805.248</b>	<b>58.121.798</b>	<b>-</b>	<b>110.927.046</b>
<b>Nilai Buku / Book value</b>	<b>179.545.158</b>			<b>628.099.735</b>
<b>31 Des 2019/Dec 31, 2019</b>				
	<b>Saldo awal/ Beginning balance</b>	<b>Penambahan/ Increase</b>	<b>Pengurangan/ Decrease</b>	<b>Saldo akhir/ Ending balance</b>
<b>Harga perolehan / At Cost</b>				
Peralatan Proyek / Projects Equipments	-	17.446.782	-	17.446.782
Peralatan Kantor / Office Equipments	1.872.000	153.498.624	-	155.370.624
Kendaraan / Vehicle	37.283.000	22.250.000	-	59.533.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>39.155.000</b>	<b>193.195.406</b>	<b>-</b>	<b>232.350.406</b>
<b>Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation</b>				
Peralatan Proyek / Projects Equipments	-	1.077.345	-	1.077.345
Peralatan Kantor / Office Equipments	-	15.781.507	-	15.781.507
Kendaraan/ Vehicle	29.493.396	6.453.000	-	35.946.396
<b>Jumlah / Total</b>	<b>29.493.396</b>	<b>23.311.852</b>	<b>-</b>	<b>52.805.248</b>
<b>Nilai Buku / Book value</b>	<b>9.661.604</b>			<b>179.545.158</b>

Beban penyusutan dialokasikan sebagai bagian dari akun "Beban umum dan administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (lihat Catatan 22).

Depreciation expenses were allocated as part of account "General and administrative expense" in the statements of profit or loss and other comprehensive income (see Note 22).



**10. ASET TETAP (LANJUTAN)**

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, diasuransikan bersama terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya (all risk) berdasarkan suatu paket polis dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 155.675.000 pada tanggal 31 Desember 2020. Manajemen Entitas berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Jumlah harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 37.283.000 dan Rp 18.582.000.

Aset tetap tertentu dijaminkan atas utang dari PT Mandiri Tunas Finance

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap Entitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**11. UTANG BANK**

Akun ini merupakan utang bank kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp 6.376.968.924 dan Rp 5.568.292.301 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon)**

Entitas memperoleh fasilitas kredit yang terdiri dari:

Fasilitas/ Facilities	Maksimum Kredit/ Maximum Credit
Kredit Rekening Koran / Current Account Credit	Rp 2.000.000.000
Kredit Berjangka/ Term Loan	Rp 4.400.000.000

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Fasilitas ini dapat diperpanjang atas persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia

Pinjaman ini dijamin dengan aset pemegang saham sebagai berikut:

- Tanah yang terletak di Desa Jatipadang dengan SHM No. 5332 seluas 278 m2 atas nama Richie Adrian Hartanto.
- Tanah yang terletak di Desa Sawah dengan SHM No. 1218 seluas 130 m2 atas nama Rama Permana dan Andry Setiawan.

**10. FIXED ASSETS (CONTINUED)**

The Entity's fixed assets, except land rights, were covered by insurance against losses against fire or theft and other risks under blanket policies amounting to Rp 155.675.000 as of December 31, 2020. The Entity's management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

The acquisition costs of fixed assets which have been fully depreciated and still being used as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 37,283,000 and Rp 18,582,000, respectively.

These fixed assets are pledged for loan from PT Mandiri Tunas Finance

Based on the evaluation performed, management believes that there are no events or changes in the circumstances, which may indicate impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019.

**11. SHORT-TERM BANK LOAN**

This account represents bank loan to PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting to Rp 6,376,968,924 and Rp 5,568,292,301 as of December 31, 2020 and 2019.

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon)**

The Entity obtained credit facilities which consist of:

Bunga/ Interest	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date
11,00%	23 Mei 2021/ May 23, 2021
11,00%	23 Mei 2021/ May 23, 2021

These credit facilities are used for additional working capital and bears annual interest rate at 11% per annum as of December 31, 2020 and 2019. This facilities can be extended with the approval from PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

These loans are secured by assets of shareholders as follows:

- Land which are located on Desa Jatipadang with SHM No. 5332 for 278 m2 under the name of Richie Adrian Hartanto.
- Land which are located on Desa Sawah with SHM No. 1218 for 130 m2 under the name of Rama Permana and Andry Setiawan.

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**12. UTANG USAHA**

Utang usaha per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</u>
Utang usaha pihak ketiga	
Lilik Rudiyono	228.659.800
PT Lucatama Karya Panelindo	103.750.000
Lain-lain (di bawah Rp 100 juta)	20.913.850
<b>Jumlah hutang usaha pihak ketiga</b>	<b><u>353.323.650</u></b>

	<u>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</u>
Analisa umur utang usaha	
0 - 30 hari	353.323.650
31 - 60 hari	-
61 - 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	-
<b>Jumlah hutang usaha pihak ketiga</b>	<b><u>353.323.650</u></b>

**13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</u>
Karyawan	-
Lain-lain	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>-</u></b>

**14. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON BANK**

Utang lembaga keuangan non bank per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</u>
PT Lunaria Annu Teknologi	2.000.000.000
PT Gradana Teknoruci Indonesia	860.000.000
PT Mandiri Tunas Finance	88.419.981
<b>Jumlah</b>	<b><u>2.948.419.981</u></b>
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b><u>(2.887.860.839)</u></b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b><u>60.559.142</u></b>

**PT Lunaria Annu Teknologi**

Pada tanggal 7 Oktober 2019, Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Lunaria Annu Teknologi dengan plafond sebesar Rp 1.000.000.000 untuk pembiayaan tagihan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 20,4 % per tahun, yang akan jatuh tempo pada 7 Oktober 2020.

Pada tanggal 29 Juli 2020, Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Lunaria Annu Teknologi dengan plafond sebesar Rp 2.000.000.000 untuk pembiayaan invoicing. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 21,9% per tahun dan akan jatuh tempo pada 29 Juli 2021.

**12. TRADE PAYABLE**

Trade payable as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	<u>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</u>
Trade payable - third parties	
Lilik Rudiyono	-
PT Lucatama Karya Panelindo	-
Others (Under Rp 100 million)	791.705.411
<b>Total trade payable third parties</b>	<b><u>791.705.411</u></b>

	<u>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</u>
--	--------------------------------------

Analisa umur utang usaha	
0 - 30 hari	791.705.411
31 - 60 hari	-
61 - 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	-
<b>Total account payable third parties</b>	<b><u>791.705.411</u></b>

*Trade payable - third parties*  
*Lilik Rudiyono*  
*PT Lucatama Karya Panelindo*  
*Others (Under Rp 100 million)*

*The aging analysis on trade payables*  
*0 - 30 days*  
*31 - 60 days*  
*61 - 90 days*  
*More than 90 days*

**13. ACCRUED EXPENSES**

Accrued expenses as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	<u>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</u>
Karyawan	29.365.470
Lain-lain	70.791.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>100.156.470</u></b>

*Employee*  
*Others*  
**Total**

**14. NON FINANCIAL INSTITUTION LOAN**

Non financial institution loan as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	<u>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</u>
PT Lunaria Annu Teknologi	1.000.000.000
PT Gradana Teknoruci Indonesia	1.491.000.000
PT Mandiri Tunas Finance	-
<b>Total</b>	<b><u>2.491.000.000</u></b>
<b>Short-term-portion</b>	<b><u>(2.491.000.000)</u></b>
<b>Long-term portion</b>	<b><u>-</u></b>

**PT Lunaria Annu Teknologi**

On October 7, 2019 the Entity enters the agreement with PT Lunaria Annu Teknologi with a ceiling of Rp 1,000,000,000 for financing facility on invoice. This loan subject to interest at 20,4% per year and will mature on the October 7, 2020.

On July 29, 2020 the Entity enters the agreement with PT Lunaria Annu Teknologi with a ceiling of Rp 2,000,000,000 for purchasing a vehicle. This loan subject to interest at 21,9% per year, financing facility on invoice and will mature on the July 29, 2020.

**14. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (LANJUTAN)**

**PT Gradana Teknoruci Indonesia**

Pada tahun 2019 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Gradana Teknoruci Indonesia dengan *plafond* sebesar Rp 816.000.000 untuk pembiayaan invoicing. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan akan jatuh tempo pada 4 Februari 2020.

Pada tahun 2019 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Gradana Teknoruci Indonesia dengan *plafond* sebesar Rp 675.500.000 untuk pembiayaan invoicing. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan akan jatuh tempo pada 31 Januari 2020.

Pada tahun 2020 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Gradana Teknoruci Indonesia dengan *plafond* sebesar Rp 600.000.000 untuk pembiayaan invoicing. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan akan jatuh tempo pada 2 Maret 2021.

Pada tahun 2020 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Gradana Teknoruci Indonesia dengan *plafond* sebesar Rp 260.000.000 untuk pembiayaan invoicing. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan akan jatuh tempo pada 23 Februari 2021.

**PT Mandiri Tunas Finance**

Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Mandiri Tunas Finance dengan *plafond* sebesar Rp 98.161.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19,6% per tahun dan akan jatuh tempo pada 3 Agustus 2023.

**15. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA**

Akun ini merupakan liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja sebesar Rp 335.549.000 dan Rp 217.239.000 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh KKA Rinaldi & Zulhamdi, aktuaris independen, Entitas mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Entitas terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat suku bunga dan risiko gaji.

**Risiko Tingkat Bunga**

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-*offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

**Risiko Gaji**

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

**14. NON FINANCIAL INSTITUTION LOAN (CONTINUED)**

**PT Gradana Teknoruci Indonesia**

*In 2019 the Entity enters the agreement with PT Gradana Teknoruci Indonesia with a ceiling of Rp 816,000,000 for financing facility on invoice. This loan subject to interest at 2% per month and will mature on the February 4, 2020.*

*In 2019 the Entity enters the agreement with PT Gradana Teknoruci Indonesia with a ceiling of Rp 675,500,000 for financing facility on invoice. This loan subject to interest at 2% per month and will mature on the January 31, 2020.*

*In 2020 the Entity enters the agreement with PT Gradana Teknoruci Indonesia with a ceiling of Rp 600,000,000 for financing facility on invoice. This loan subject to interest at 2% per month and will mature on the March 2, 2021.*

*In 2020 the Entity enters the agreement with PT Gradana Teknoruci Indonesia with a ceiling of Rp 260,000,000 for financing facility on invoice. This loan subject to interest at 2% per month and will mature on the February 23, 2021.*

**PT Mandiri Tunas Finance**

*The entity enters the agreement with PT Mandiri Tunas Finance with a ceiling of Rp 98,161,000. This loan subject to interest at 19,6% per year and will mature on the August 3, 2023.*

**15. LIABILITY ESTIMATE AND EMPLOYEE BENEFIT**

*This account represents estimated liabilities for employee benefits amounting to Rp 335,549,000 and Rp 217,239,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.*

*Based on actuarial valuation performed by KKA Rinaldi & Zulhamdi, an independent actuary, the Entity recorded a defined benefit on severance pay, gratuity and compensation benefits to employees which are presented as "Estimated Liabilities for Employee Benefits" on the statements of financial position.*

*The defined benefit pension plan typically expose the Entity to actuarial risks such as, interest rate risk and salary risk.*

**Interest Risk**

*A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability, however this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.*

**Salary Risk**

*The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.*

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)**

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
Tingkat kenaikan gaji per tahun.	5%
Motode	<i>Projected Unit Credit</i>
Usia pensiun	55 tahun / years
Tingkat bunga diskonto	7,5%

**Imbalan Pascakerja**

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
Saldo awal tahun	217.239.000
Penambahan (pengurangan) selama tahun berjalan (lihat Catatan 22)	118.310.000
Pembayaran manfaat	-
Penghasilan komprehensif lain	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>335.549.000</b>

Tabel di bawah ini menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar sebesar 100 basis poin, dengan variable lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja karyawan masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	<u>2020</u>	
	<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>	<i>Current Service cost and interest cost</i>
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	(34.356.000,00)	(34.356.000,00)
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	40.515.000,00	40.515.000,00

Manajemen Entitas berpendapat bahwa jumlah penyisihan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018).

**15. LIABILITY ESTIMATE AND EMPLOYEE BENEFIT (CONTINUED)**

Some of the assumptions used for the actuarial calculations are as follows:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
Tingkat kenaikan gaji per tahun.	5%	<i>Wage (salary) increase</i>
Motode	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Method</i>
Usia pensiun	55 tahun / years	<i>Pension age</i>
Tingkat bunga diskonto	7,5%	<i>Interest rate on liabilities</i>

**Post-Employment Benefits**

The mutation of estimated liabilities for employee benefits as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
Saldo awal tahun	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan (pengurangan) selama tahun berjalan (lihat Catatan 22)	217.239.000	<i>Addition (deduction) during the current year (see Note 22)</i>
Pembayaran manfaat	-	<i>Payment of benefits</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	<i>Other comprehensive income</i>
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>217.239.000</b>	<b>Ending balance</b>

The following table summarizes the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates of 100 basis point, with all other variables held constant, of the estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense as of December 31, 2020 and 2019:

	<u>2019</u>		
	<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>	<i>Current service cost and interest cost</i>	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	-	-	<i>Increase in interest rate in 100 basis point</i>
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	-	-	<i>Decrease in interest rate in 100 basis point</i>

The management of the Entity believes that the allowance as of December 31, 2020 and 2019 is adequate to meet the requirements of Labor Law No. 13/2003 and PSAK No. 24 (Improvement 2018).

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. MODAL SAHAM**

Rincian pemegang saham dan jumlah kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**16. CAPITAL STOCK**

The details of the Entity's shareholders and their percentage of ownership as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

<b>31 Des 2020/Dec 31, 2020</b>				
Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham/ Par Value Rp 1.000.000 per Share				
Pemegang Saham	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Share Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership ( % )	Jumlah/ Total	Stockholders
Richie Adrian Hartanto	1.420	71,00%	1.420.000.000	Richie Adrian Hartanto
Rama Permana	580	29,00%	580.000.000	Rama Permana
<b>Jumlah</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>Total</b>

**17. PENDAPATAN**

Rincian pendapatan 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**17. REVENUE**

Details of revenue in 2020 and 2019 were as follows:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
Jasa Konstruksi	4.671.410.663	3.462.563.021	Construction services
Jasa Interior	3.122.700.000	3.932.632.597	Interior services
<b>Jumlah</b>	<b>7.794.110.663</b>	<b>7.395.195.618</b>	<b>Total</b>

**18. HARGA POKOK PENJUALAN**

Rincian harga pokok penjualan 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**18. COST OF GOODS SOLD**

Details of cost of goods sold in 2020 and 2019 were as follows:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
Bahan baku	1.169.116.599	1.183.231.299	Salary
Tenaga kerja langsung	451.060.699	388.042.874	Depreciation
Overhead	2.727.938.732	2.625.294.444	Electricity, Waters & Gas
<b>Jumlah beban pokok penjualan</b>	<b>4.348.116.030</b>	<b>4.196.568.617</b>	<b>Total cost of goods sold</b>

**19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Rincian beban umum dan administrasi 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**19. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE**

Details of general and administrative expense in 2020 and 2019 were as follows:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
Gaji dan honorarium	1.534.939.301	1.170.057.126	Salaries
Kantor	307.486.647	339.313.099	Office
Imbalan kerja (lihat Catatan 15)	118.310.000	217.239.000	Employee benefits (see Note 15)
Fasilitas transportasi dan mobilitas	100.760.878	163.510.521	Transport and mobility facilities
Penyusutan (lihat Catatan 10)	58.121.798	23.311.852	Depreciation (see Note 10)
Perjalanan dinas	13.165.244	69.339.926	Travelling
<b>Jumlah beban umum dan administrasi</b>	<b>2.132.783.868</b>	<b>1.982.771.524</b>	<b>Total general and administrative expense</b>

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. PENDAPATAN LAIN-LAIN**

Rincian pendapatan lain-lain 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</u>
Pendapatan bunga pinjaman	946.100.466
Pendapatan bunga bank	2.969.591
<b>Jumlah pendapatan lain-lain</b>	<b><u>949.070.057</u></b>

**21. BEBAN PENJUALAN**

Rincian beban penjualan 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</u>
Pemasaran dan komunikasi	307.173.308
<b>Jumlah beban penjualan</b>	<b><u>307.173.308</u></b>

**22. BEBAN LAIN-LAIN**

Rincian beban lain-lain 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</u>
Biaya bunga bank	755.154.554
Biaya administrasi bank & lembaga keuangan	164.948.255
Biaya penurunan nilai piutang (lihat Catatan 6)	367.400.000
<b>Jumlah beban lain-lain</b>	<b><u>1.287.502.809</u></b>

**23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Entitas melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan tingkat harga wajar dan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat hubungan	Pihak Berelasi/Related Parties	Nature of Relationships
Pemegang saham Entitas :	Richie Adrian Hartanto	: The Entity's Stockholders
Pemegang saham dan : manajemennya sama dengan Entitas	PT Mangkok Besar Cuan	: Related parties which have the same Stockholders and management as the Entity

Transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Entitas melakukan transaksi keuangan dengan pihak berelasi. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut sebesar Rp 432.481.098 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020, disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-lain – Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan (lihat Catatan 7).

**20. OTHER INCOME**

Other of income in 2020 and 2019 were as follows :

	<u>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</u>	
	647.945.744	<i>Interest income from loans</i>
	3.697.611	<i>Interest income from bank</i>
<b>Total other income</b>	<b><u>651.643.355</u></b>	

**21. SELLING EXPENSES**

Details of selling expenses in 2020 and 2019 were as follows :

	<u>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</u>	
	364.178.251	<i>Marketing and Communications</i>
<b>Total selling expenses</b>	<b><u>364.178.251</u></b>	

**22. OTHER EXPENSES**

Details of other expenses in 2020 and 2019 were as follows :

	<u>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</u>	
	758.618.737	<i>Bank interest expenses</i>
	-	<i>Bank administration and financial institution expenses</i>
	-	<i>Allowance for impairment</i>
	-	<i>Value of receivable expenses (see Note 6)</i>
<b>Total other expenses</b>	<b><u>758.618.737</u></b>	

**23. BALANCES AND SIGNIFICANT TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

The Entity, in the ordinary course of business, had trade and financial transactions with related parties. The transactions with related parties were conducted on an arm's length basis similar to third parties. The nature of the Entity's relationships with related parties are as follows:

Significant transactions and balances with related parties are as follows:

The Entity conducted financial transaction with related parties. The related outstanding amounting to Rp 432,481,098 as of December 31, 2020 respectively, are presented as "Other Receivables – Related Party" in the statement of financial position (see Note 7).

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (LANJUTAN)**

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 3,24% dari jumlah

**24. PERPAJAKAN**

**a. Utang pajak**

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.810.900
Pajak Penghasilan Pasal 25	168.900
Pajak Penghasilan Pasal 29	143.005.025
Pajak Pertambahan Nilai	33.772.633
Denda Pajak	195.100.485
<b>Jumlah</b>	<b>375.857.943</b>

Pada tahun 2020 Entitas memiliki denda pajak sebesar Rp 195.100.485 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Nomor/ Number	Tanggal/ Date	Masa pajak/ Tax periode	Jumlah/ Amount
00059/207/16/416/17	Oktober 2017/ October 2017	Januari - Desember 2016/ January - December 2016	89.406.903
00060/207/16/416/17	Oktober 2017/ October 2017	Januari - Desember 2016/ January - December 2016	105.693.582

**b. Beban Pajak**

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
Final	(190.020.785)
Non Final	(156.509.068)
Tangguhan	26.028.200
<b>Jumlah</b>	<b>(320.501.653)</b>

**Pajak kini**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum taksiran beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran laba (rugi) kena pajak untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
Laba sebelum taksiran beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	667.604.705
Rugi sebelum pajak yang dikenakan pajak final	(242.016.106)
Laba sebelum pajak yang tidak dikenakan pajak final	425.588.599

**23. BALANCES AND SIGNIFICANT TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (CONTINUED)**

Other receivables to related party as of December 31, 2020 represented 3,24% of total asset, respectively.

**24. TAXATION**

**a. Taxes payable**

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
	14.498.200	Article 21
	555.500	Article 25
	111.369.256	Article 29
	77.758.711	Vat
	537.802.814	Tax penalties
<b>Total</b>	<b>741.984.481</b>	<b>Total</b>

In 2020 the Entity has a tax penalty amounted Rp 195.100.485 for Tax Assessment Letter of Undepayment on Value Added Tax (SKPKB) as follows:

**b. Tax Expenses**

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
	(172.224.644)	Final
	(137.280.826)	Non final
	47.792.580	Deferred
<b>Total</b>	<b>(261.712.890)</b>	<b>Total</b>

**Current tax**

The reconciliations between income (loss) before provision for tax expense, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income (loss) for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively, are as follows:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>	
	744.701.844	Income before provision for tax expense according to the statements of profit and loss and other comprehensive income
	(148.984.452)	Loss before tax subject to final tax
	595.717.392	Income before tax that is not subject to final tax

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**24. PERPAJAKAN (LANJUTAN)**

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
Beda waktu :	
Imbalan Kerja	118.310.000
Taksiran laba (rugi) fiskal kena pajak	543.898.599
	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
Beban pajak kini – non final	156.509.068
Dikurangi kredit pajak :	
PPH Pasal 23	(10.317.444)
PPH Pasal 25	(3.186.600)
Kurang bayar pajak	143.005.024

**c. Pajak tangguhan**

Perhitungan taksiran beban pajak tangguhan – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
Imbalan kerja	26.028.200
<b>Penghasilan (Beban) pajak tangguhan</b>	<b>26.028.200</b>

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal dan kumulatif rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</b>
<b>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan</b>	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	73.820.780
Aset Pajak Tangguhan – Bersih	73.820.780

Berdasarkan evaluasi, manajemen Entitas berkeyakinan bahwa saldo aset pajak tangguhan dapat terealisasi.

**25. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Entitas telah merubah standar akuntansi yang diterapkan atas laporan keuangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sesuai dengan Surat nomor 013/HDK/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022

Entitas menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 sehubungan dengan koreksi kesalahan dan penerapan secara retrospektif PSAK No. 24 dan PSAK No. 46. Ringkasan laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut :

**24. TAXATION (CONTINUED)**

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>
	217.239.000
	812.956.000
	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>
	137.280.826
	(20.356.570)
	(5.555.000)
	111.369.256

**c. Deferred tax**

The computation of deferred tax expense – net for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>
	47.792.580
	<b>47.792.580</b>

The tax effects of significant temporary differences between financial and tax reporting and cumulative fiscal loss as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	<b>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</b>
	47.792.580
	47.792.580

Based on evaluation, the management of the Entity believes that the balance of deferred tax assets can be realized.

**25. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS**

The Entity had changed the accounting standards applied to Financial Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) to statements of Financial Accounting Standards (SAK). In accordance with Letter number 013/HDK/XII/2022 dated 01 December 2022

The Entity restates its financial statements as of December 31, 2020 with respect to correcting errors and retrospectively applying PSAK No. 24 and PSAK No. 46. The summary statements of financial position for the years ended December 31, 2020 before and after restatement are as follows:



**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**25. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

	<b>Sebelum Penyajian Kembali / Before Restatement</b>
Kas dan bank	805.596.624
Piutang usaha	805.596.624
Piutang lain-lain	2.163.248.410
Biaya dibayar di muka	1.100.000.000
Aset hak guna	-
Aset pajak tangguhan	-
Aset tetap	121.025.717
Utang bank	-
Utang usaha	620.906.168
Utang pajak	195.473.118
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Lembaga keuangan bukan bank	-
Liabilitas jangka panjang – dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Lembaga keuangan bukan bank	1.000.000.000
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	-
Saldo laba	373.491.465
Harga pokok penjualan	(4.571.190.223)
Pendapatan lain-lain	-
Beban penjualan	-
Beban umum dan administrasi	(2.418.129.503)
Beban lain-lain	-
Beban pajak	-

**26. PERIKATAN**

a. Belly Ferdiansyah

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0001/PKMK/2019 tanggal 24 Juli 2019 kepada Belly Ferdiansyah dengan plafond sebesar Rp 3.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2020 (lihat Catatan 7).

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/ADD-1/0001/PKMK/2019 tanggal 9 Januari 2020 kepada Belly Ferdiansyah dengan plafond sebesar Rp 3.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021 (lihat Catatan 7).

b. Tommy Fredi Hasibuan

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0002/PKMK/2020 tanggal 9 Oktober 2020 kepada PT Mangkok Besar Cuan dengan plafond sebesar Rp 450.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2021 (lihat Catatan 7).

**25. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)**

	<b>Setelah Penyajian Kembali / After Restatement</b>	
	919.807.215	<i>Cash on hand and in banks</i>
	495.010.000	<i>Trade receivables</i>
	11.108.494.911	<i>Other receivables</i>
	35.550.000	<i>Prepaid expenses</i>
	82.083.335	<i>Right of used assets</i>
	73.820.780	<i>Deferred tax assets</i>
	628.099.735	<i>Fixed assets</i>
	6.376.968.924	<i>Short term bank loan</i>
	353.323.650	<i>Trade payables</i>
	375.857.943	<i>Taxes payable</i>
		<i>Current portion of long-term liabilities</i>
	2.887.860.839	<i>Financial institution non bank</i>
		<i>Long-term liabilities – less current portion</i>
		<i>Financial institution non bank</i>
	60.559.142	<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>
	335.549.000	<i>Retained earnings</i>
	952.746.478	<i>Cost Of Goods Sold</i>
	(4.348.116.030)	<i>Other income</i>
	949.070.057	<i>Selling expenses</i>
	(307.173.308)	<i>General and administrative expenses</i>
	(2.132.783.868)	<i>Other expenses</i>
	(1.287.502.809)	<i>Tax expenses</i>
	(320.501.653)	

**26. COMMITMENTS**

a. Belly Ferdiansyah

The entity enters the agreement No. HDK/0001/PKMK/2019 dated July 24, 2019 with Belly Ferdiansyah with a plafond of Rp 3,000,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 25, 2020 (see Note 7)

The entity enters the agreement No. HDK/ADD-1/0001/PKMK/2019 dated January 9, 2020 with Belly Ferdiansyah with a ceiling of Rp 3,000,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 25, 2021 (see Note 7).

b. Tommy Fredi Hasibuan

The Entity enters the agreement No. HDK/0002/PKMK/2020 dated October 9, 2020 with PT Mangkok Besar Cuan with a plafond of Rp 450,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 12, 2021 (see Note 7).

**26. PERIKATAN (LANJUTAN)**

c. PT Mangkok Besar Cuan

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0002/PKMK/2020 tanggal 9 Oktober 2020 kepada PT Mangkok Besar Cuan dengan plafond sebesar Rp 450.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2021 (lihat Catatan 7).

d. PT Pilar Karya Perkasa

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0006/PKMK/2020 tanggal 25 Juli 2020 kepada PT Pilar Karya Perkasa dengan plafond sebesar Rp 7.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2021 (lihat Catatan 7).

e. Dr. Farm

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0003/PKMK/2020 tanggal 7 Desember 2020 kepada Dr. Farm dengan plafond sebesar Rp 250.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2021 (lihat Catatan 7).

f. PT Matrixindo Multi Kreasi

Entitas melakukan perjanjian pinjaman No. HDK/0004/PKMK/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada PT Matrixindo Multi Kreasi dengan plafond sebesar Rp 6.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2020 (lihat Catatan 7).

**27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Entitas menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Entitas.
- Risiko likuiditas: Entitas menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Entitas dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing karena Entitas tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

**26. COMMITMENTS (CONTINUED)**

c. *PT Mangkok Besar Cuan*

*The Entity enters the agreement No. HDK/0002/PKMK/2020 dated October 9, 2020 with PT Mangkok Besar Cuan with a plafond of Rp 450,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 12, 2021 (see Note 7).*

d. *PT Pilar Karya Perkasa*

*The Entity enters the agreement No. HDK/0006/PKMK/2020 dated July 25, 2020 with PT Pilar Karya Perkasa with a plafond of Rp 7,000,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the July 25, 2021 (see Note 7).*

e. *Dr. Farm*

*The entity enters the agreement No. HDK/0003/PKMK/2020 dated December 7, 2020 with Dr. Farm with a plafond of Rp 250,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the January 8, 2021 (see Note 7).*

f. *PT Matrixindo Multi Kreasi*

*The entity enters the agreement No. HDK/0004/PKMK/2019 dated July 10, 2019 with PT Matrixindo Multi Kreasi with a plafond of Rp 6,000,000,000. This loan subject to interest at 12% per year and will mature on the April 10, 2020 (see Note 7).*

**27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

a. *Financial Risk Management Factors and Policies In their operating, investing and financing activities, the Entity are exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:*

- *Credit risk: possibility that a customer will not pay the part or all of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Entity will incur loss.*
- *Liquidity risk: the Entity defined liquidity risk from the collectibility of the accounts receivable as mentioned above, which may cause difficulty in meeting the obligations of the Entity relating to financial liabilities.*
- *Market risk: currently there are no market risk other than interest rate risk and foreign currency exchange rate risk as the Entity do not invest in any financial instruments in their normal activities.*

**27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)**

**Risiko Kredit**

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang pihak berelasi. Entitas mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan dan pihak berelasi.

**27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)**

**Credit Risks**

Credit risk represents the risk of financial loss of the Entity if any customer or other party of a financial instrument fails to meet contractual liabilities. This risk arises mainly from trade receivables and other receivables. The Entity manage and control credit risk from trade receivables and due from related parties by monitoring the default limit period on each customer and related party

<b>2020</b>					
<u>Telah jatuh tempo/Past due</u>					
	Kurang dari 1 tahun/ Less 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over 1 year	Penurunan nilai/ Impairment	Jumlah/Total	
Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi					<i>Financial Assets Measured at Amortized Cost</i>
Bank	919.263.315	-	-	919.263.315	<i>Cash in banks</i>
Piutang usaha	495.010.000	-	-	495.010.000	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	11.108.494.911	-	-	11.108.494.911	<i>Other receivables</i>
Jumlah	<u>12.522.768.226</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.522.768.226</u>	<i>Total</i>

<b>2019</b>					
<u>Telah jatuh tempo/Past due</u>					
	Kurang dari 1 tahun/ Less 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over 1 year	Penurunan nilai/ Impairment	Jumlah/Total	
Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi					<i>Financial Assets Measured at Amortized Cost</i>
Bank	793.651.749	-	-	793.651.749	<i>Cash in banks</i>
Piutang usaha	1.464.306.694	-	-	1.464.306.694	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	9.765.832.908	-	-	9.765.832.908	<i>Other receivables</i>
Jumlah	<u>12.023.791.351</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.023.791.351</u>	<i>Total</i>

**Risiko Likuiditas**

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Entitas dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Entitas memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya

Dalam mengelola risiko likuiditas Entitas melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

**Liquidity Risks**

Through their operations and existing funding sources, the Entity can meet all their financial obligations as they mature, because the Entity have the financial assets which are liquid and available to meet liquidity needs.

In managing the liquidity risk, the observe strict control on the forecast and continuous realization of actual cash flows from both collectibility of receivables as well as the fulfillment of obligations and due dates.

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT. HARTA DJAYA KARYA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2020**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)**

**27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)**

Tabel berikut menyajikan jumlah liabilitas keuangan pada 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan jatuh temponya:

The following table presents the amount of financial liabilities on December 31, 2020 and 2019, based on their maturity:

	31 Des 2020 / Dec 31, 2020		Jumlah / Total
	Kurang dari 1 (satu) tahun (less than a year)	Lebih dari 1 (satu) tahun (more than a year)	
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Financial Assets Measured at Amortized Cost</i>			
Utang Bank / <i>Bank loan</i>	6.376.968.924	-	6.376.968.924
Utang usaha / <i>Trade payables</i>	353.323.650	-	353.323.650
Utang lembaga keuangan non - bank / <i>Financial institution loan non - bank</i>	2.887.860.839	60.559.142	2.948.419.981
<b>Jumlah / Total</b>	<b>9.618.153.413</b>	<b>60.559.142</b>	<b>9.678.712.555</b>
	31 Des 2019 / Dec 31, 2019		
	Kurang dari 1 (satu) tahun (less than a year)	Lebih dari 1 (satu) tahun (more than a year)	Jumlah / Total
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Financial Assets Measured at Amortized Cost</i>			
Utang Bank / <i>Bank loan</i>	5.568.292.301	-	5.568.292.301
Utang usaha / <i>Trade payables</i>	791.705.411	-	791.705.411
Beban masih harus dibayar / <i>Accrued expenses</i>	100.156.470	-	100.156.470
Utang lembaga keuangan non - bank / <i>Financial institution loan non - bank</i>	2.491.000.000	-	2.491.000.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>8.951.154.182</b>	<b>-</b>	<b>8.951.154.182</b>

**Risiko Suku Bunga**

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, profil instrumen keuangan Entitas yang dipengaruhi bunga adalah:

**Interest Rate Risks**

The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

On the statement of financial position date, the Entity's profile of financial instruments that affected by the interest, as follows:

	2020	2019 (Tidak diaudit/ Unaudited)	
<b>Instrumen dengan bunga tetap</b>			<b>Flat interest Instrument</b>
Aset keuangan	-	-	<i>Financial assets</i>
Liabilitas keuangan	2.948.419.981	2.491.000.000	<i>Financial liabilities</i>
<b>Jumlah liabilitas – bersih</b>	<b>(2.948.419.981)</b>	<b>(2.491.000.000)</b>	<b>Total assets (liabilities) – net</b>

**27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)**

**Instrumen dengan bunga mengambang**

Aset keuangan	919.263.315
Liabilitas keuangan	6.376.968.924
Jumlah liabilitas – bersih	(5.457.705.609)

Entitas tidak secara signifikan terekspos risiko suku bunga, terutama menyangkut deposito kepada bank yang menggunakan tingkat bunga pasar. Sehingga, Entitas tidak memiliki kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**Analisis Sensitivitas**

Tabel berikut menyajikan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga yang mungkin terjadi, dengan variabel lain tetap konstan, terhadap laba Entitas selama tahun berjalan:

<u>Tingkat suku bunga BI</u>	<u>2020</u>
Kenaikan tingkat suku bunga dalam basis poin	(125)
Efek terhadap laba tahun berjalan	53.212.630

**27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)**

**Floating interest Instruments**

	792.764.849	<i>Financial assets</i>
	5.568.292.301	<i>Financial liabilities</i>
	(4.775.527.452)	<i>Total liabilities – net</i>

*The Entity is not significantly exposed to interest rate risk, especially with regard to deposits to banks which use market interest rate. Thus, the Entity does not have a policy or a particular arrangement to interest rate risk. There is no interest rate hedging activities as of December 31, 2020 and 2019.*

**Sensitivity Analysis**

*The following table summarizes the sensitivity of interest rate changes that may occur, with other variables held constant, the profit of the Entity during the year:*

<u>Tingkat suku bunga BI</u>	<u>2019</u>	<u>Interest rate BI</u>
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	
Kenaikan tingkat suku bunga dalam basis poin	(100)	<i>Increase in interest rates in basis points</i>
Efek terhadap laba tahun berjalan	35.816.456	<i>Effects on income for the year</i>

**28. PENGELOLAAN MODAL**

Tujuan pengelolaan modal Entitas adalah untuk pengamanan kemampuan Entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya serta untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalan, Entitas memaksimalkan penerimaan kas dari penjualan

Seluruh struktur permodalan Entitas merupakan modal sendiri. Entitas tidak memiliki liabilitas untuk memelihara rasio keuangan dan struktur permodalan tertentu.

Struktur permodalan Entitas adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2020 / Dec 31, 2020</u>		
	<u>Jumlah / Total</u>	<u>%</u>	
Liabilitas jangka pendek	9.994.011.356	74,90%	<i>Short - term liability</i>
Liabilitas jangka panjang	396.108.142	2,97%	<i>Long - term liability</i>
Jumlah Liabilitas	10.390.119.498	77,87%	<i>Total liability</i>
Jumlah Ekuitas	2.952.746.478	22,13%	<i>Total equity</i>
<b>Jumlah</b>	<b>13.342.865.976</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>
Rasio Utang terhadap Ekuitas	<u>3,52</u>		<i>Debt to Equity Ratio</i>

**28. CAPITAL MANAGEMENT**

*The objectives of capital management are to secure the Entity's ability to continue its business in order to deliver results for stockholders and benefits to other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital.*

*In order to maintain or adjust the capital structure, the Entity maximizes the cash proceeds from the sale.*

*The Entity has its own capital structure, therefore the Entity doesn't have obligation to maintain a certain financial ratio and certain capital structure.*

*The Entity's capital structure are as follows:*

**28. PENGELOLAAN MODAL (LANJUTAN)**

**28. CAPITAL MANAGEMENT (CONTINUED)**

	31 Des 2019 / Dec 31, 2019		
	Jumlah / Total	%	
Liabilitas jangka pendek	9.693.138.663	77,45%	Short - term liability
Liabilitas jangka panjang	217.239.000	1,74%	Long - term liability
Jumlah Liabilitas	9.910.377.663	79,18%	Total liability
Jumlah Ekuitas	2.605.643.426	20,82%	Total equity
<b>Jumlah</b>	<b>12.516.021.089</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>
Rasio Utang terhadap Ekuitas	<u>3,80</u>		Debt to Equity Ratio

**29. INFORMASI PENTING LAINNYA**

**29. OTHER IMPORTANT INFORMATION**

a) Undang-undang No. 2 Tahun 2020

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2020 terdapat penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut :

1. Penurunan tarif menjadi 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021;
2. Penurunan tarif menjadi 20% yang berlaku pada Tahun Pajak 2022;
3. Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% memperoleh tarif 3% lebih rendah dari poin 1 dan 2 di atas (dan apabila memenuhi syarat tertentu).

b) Pemberlakuan Omnibus Law

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang "Cipta Kerja" yang disebut dengan "Omnibus Law" telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Omnibus Law bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing kedalam negeri dengan meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong iklim investasi nasional di Indonesia.

Omnibus Law mengatur kebijakan strategis yang meliputi:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. Ketenagakerjaan;
3. Kemudahan, perlindungan, serta untuk pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM");
4. Kemudahan berusaha;
5. Dukungan riset dan inovasi;
6. Pengadaan tanah;
7. Kawasan ekonomi;
8. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
10. Pengenaan sanksi.

Omnibus Law mengubah sejumlah undang-undang yang ada, antara lain UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") dan UU No. 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional ("UU Jaminan Sosial").

a) Law No. 2 Year 2020

Based on Law No. 2 Year 2020 there are some adjustments on income tax rates of the domestic corporate taxpayer and permanent establishment, as follows:

1. Decrease the tax rates to 22% effective for the Fiscal Years 2020 and 2021;
2. Decrease the tax rates to 20% effective for the Fiscal Year 2022;
3. Domestic corporate taxpayer in the form of publicly-listed entity with total number of shares of at least 40% traded at the Indonesian Stock Exchange which obtain 3% tax rate lower than in points 1 and 2 above (and when certain conditions are met).

b) Enactment of Omnibus Law

On November 2, 2020, the Law No. 11 Year 2020 regarding "Jobs Creation", commonly referred to as the "Omnibus Law" was signed by the President of the Republic of Indonesia. The Omnibus Law aims create jobs and raise foreign and domestic investments by improving the ease of doing business and boost the national investment climate in Indonesia.

The Omnibus Law regulates strategic policies which include:

1. Growth of investment ecosystem and business activities;
2. Employment and Labor;
3. Convenience, protection and empowerment of cooperatives and Micro, Small and Medium-sized Enterprises ("MSMEs");
4. Ease of doing business;
5. Support for research and innovation;
6. Land procurement;
7. Economic zones;
8. Central Government investment and national strategic projects;
9. Implementation of government administration; and
10. Imposition of sanctions.

The Omnibus Law amends a number of existing laws, including Law No. 13 of 2003 on Labor ("Labor Law") and Law No. 40 of 2004 on National Social Security System ("Social Security Law"), amongst others.

**29. INFORMASI PENTING LAINNYA (LANJUTAN)**

b) Pemberlakuan Omnibus Law (Lanjutan)

Perubahan penting dalam undang-undang Ketenagakerjaan meliputi: masa kerja tertentu, outsourcing, lembur, upah minimum, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain.

Omnibus Law memperkenalkan program jaminan sosial baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan atau jaminan pengangguran. Program yang baru diperkenalkan ini akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karyawan yang diberhentikan berhak atas manfaat dari program jaminan sosial pengangguran dalam bentuk uang tunai, akses ke informasi di pasar kerja dan pelatihan kerja. Pelaksanaan program jaminan pengangguran akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Tiga dari undang-undang utama berkaitan dengan perpajakan yang dipengaruhi oleh Omnibus Law adalah:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan/KUP;
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Beberapa perubahan penting pada undang-undang ini termasuk pelonggaran sanksi bagi wajib pajak, pembebasan pajak jenis tertentu (termasuk beberapa dividen dan pendapatan luar negeri), pengenalan konsep perpajakan teritorial, tax allowance dan juga beberapa perubahan dalam aturan PPN termasuk relaksasi pengkreditan PPN masukan yang menawarkan hasil yang lebih adil dan mendorong penguatan perekonomian.

Sampai dengan tanggal laporan audit ini, Entitas masih mengevaluasi dampak dari Omnibus Law tersebut. Dampak tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan jika diketahui dan dapat diperkirakan.

c) Pandemi Covid-19

Operasi Entitas dapat terdampak secara merugikan oleh wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Dampak merugikan dari Covid-19 terhadap perekonomian global dan Indonesia meliputi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, pelemahan kurs tukar terhadap mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari wabah Covid-19 terhadap Indonesia serta Entitas belum dapat dijelaskan untuk saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 atau wabah yang berkepanjangan dapat berdampak buruk pada Indonesia serta Entitas. Namun, dampak masa depan juga akan bergantung pada efektivitas kebijakan tanggapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**29. OTHER IMPORTANT INFORMATION (CONTINUED)**

b) Enactment of Omnibus Law (Continued)

*The essential changes on Labor law include: definite period of employment, outsourcing, overtime, minimum wage, termination of employment, amongst others.*

*The Omnibus Law introduces a new social security program, i.e., jaminan kehilangan pekerjaan or unemployment security. This newly introduced program will be administered by the Manpower Social Security Organizing Agency [Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan]. Terminated employees are entitled to benefits from the unemployment social security program in the form of cash, access to information on the job market and job training. The implementation of the unemployment security program will be further regulated under a government regulation.*

*Three of the major laws relating to taxation are impacted by the Omnibus Law:*

1. *The General Tax Procedures (Ketentuan Umum Perpajakan/KUP) Law;*
2. *The Income Tax Law (ITL); and*
3. *The Value Added Tax (VAT) Law.*

*Some of the important changes to these laws include relaxation of sanctions on taxpayers, exempting certain types of income from tax (including some dividends and offshore income), introduction of a limited territorial, tax allowance and also several changes in the VAT rules including relaxation of crediting VAT-in that offer a more fair and reasonable outcome and encourage to strengthen the economy.*

*As of the date of this audit report, the Entity are still currently evaluating the impact of the Omnibus Law. Such effects will be reported in the financial statements when they known and can be estimated.*

c) Covid-19 Pandemic

*The Entity's operations may be adversely impacted by the outbreak of Corona Virus Disease ("Covid-19"). The adverse effects of Covid-19 to the global and Indonesia economy includes negative effect to economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The future effects of the outbreak of Covid-19 to Indonesia and the Entity are unclear at this time. A significant rise in the number of Covid-19 infections or prolongation of the outbreak could have severe affect to Indonesia and the Entity. However, future effects will also depend on the effectiveness of policy responses issued by the Government of the Republic of Indonesia in response to the pandemic.*

**29. INFORMASI PENTING LAINNYA (LANJUTAN)**

c) Pandemi Covid-19 (Lanjutan)

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, telah terjadi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia ("IHSG"), Indonesian Composite Index ("ICBI"), kurs tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak dari menurunnya daya beli dan investasi yang berkontribusi oleh dampak Covid-19. Namun, dampak spesifik terhadap bisnis, pendapatan dan nilai terpulihkan dari aset dan liabilitas Entitas belum memungkinkan untuk ditentukan pada tahap ini. Dampak-dampak tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan saat dampak tersebut dapat diketahui dan diestimasi.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 (PP No. 35 Tahun 2021)

Pada tanggal 2 Februari 2021, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT"), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja" telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat:

- 1) PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu;
- 2) Jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT;
- 3) Uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT;
- 4) Perlindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih daya;
- 5) Waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu;
- 6) Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur;
- 7) Batasan Perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat panjang;
- 8) Tata cara Pemutusan Hubungan Kerja;
- 9) Pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Sampai dengan tanggal laporan audit ini, Entitas masih mengevaluasi dampak dari PP No. 35 Tahun 2021 tersebut. Dampak tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan jika diketahui dan dapat diperkirakan.

**30. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI**

Amendemen PSAK No. 73 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan:

PSAK No. 73 (Amendemen 2020) Sewa : Konsesi Sewa terkait Covid-19

**29. OTHER IMPORTANT INFORMATION (CONTINUED)**

c) Covid-19 Pandemic (Continued)

As of the date of these financial statements, there has been a decline in the Indonesia Stock Exchange Bond Index ("IHSG"), Indonesia Composite Bond Index ("ICBI") and Rupiah foreign currency exchange rates and the drop in Indonesia's economic growth which has resulted on the decline of the purchasing power and investment which were contributed by the impact of Covid-19. However, specific impact to the Entity's business, earnings, recoverability of assets and liabilities are not possible to be determined as this stage. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.

d) Republic of Indonesia Government Regulation No. 35 of 2021

On February 2, 2021, Government Regulation No. 35 of 2021 concerning "Work Agreement for Specific Time ("PKWT"), Transfer, Working Time and Time off, and Termination of Employment" had been signed by the President of the Republic of Indonesia. This regulation was issued to implement the provisions of Article 81 and Article 185 letter b of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

This Government Regulation contains, amongst others:

- 1) PKWT based on time period or completion of a certain job;
- 2) Type and nature or work activities, time period, and deadline of extension for PKWT;
- 3) Compensation for PKWT Workers/ Laborers;
- 4) Protection of Workers/Laborers and business license on outsourcing activities;
- 5) Working time in a certain business sector or occupation;
- 6) Overtime and overtime pay;
- 7) Certain company restrictions that can implement long breaks;
- 8) Procedures for Termination of Employment;
- 9) Severance pay, reward payment and compensation payment.

As of the date of this audit report, the Entity are still currently evaluating the impact of PP No. 35 Tahun 2021. Such effects will be reported in the financial statements when they known and can be estimated.

**30. FINANCIAL ACCOUNTING STANDART ANDREVISED**

Amendment to PSAK No. 73 which are effective for financial statements beginning on or after June 1, 2020, with early application permitted:

PSAK No. 73 (Amendment 2020) Leases: Rental Concessions related to Covid-19



**30. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (LANJUTAN)**

Sebagai akibat dari pandemi Covid-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amandemen terhadap PSAK No. 73 Sewa yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembavaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Standar baru dan amandemen yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 22 (Amandemen 2019), mengenai "Kombinasi Bisnis".

Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, Amandemen PSAK No. 22 tersebut:

- a. mengamendemen definisi bisnis.
- b. menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis.
- c. mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output.
- d. menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi.

- Amendemen PSAK No. 71, Amendemen PSAK No. 55, Amendemen PSAK No. 60, Amendemen PSAK No. 62 dan Amendemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang *Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2*.

Reformasi acuan suku bunga mengacu pada reformasi global yang menyepakati penggantian IBOR dengan acuan suku bunga alternatif, penggantian IBOR dibagi menjadi dua tahap yaitu:

1. Tahap 1 (Masalah Pra-penggantian).
2. Tahap 2 (Masalah penggantian).

**30. FINANCIAL ACCOUNTING STANDART ANDREVISED (CONTINUED)**

*As a result of the Covid-19 pandemic, rent concessions have been granted to lessees. Such concessions might take a variety of forms, including payment holidays and deferral of lease payments. The standardboard made an amendment to PSAK No. 73 Leases which provides lessees with an option to treat qualifying rent concessions in the same way as they would if they were not lease modifications. In many cases, this will result in accounting for the concessions as variable lease payments in the period in which they are granted.*

*Entities applying the practical expedients must disclose this fact, whether the expedient has been applied to all qualifying rent concessions or, if not, information about the nature of the contracts to which it has been applied, as well as the amount recognized in profit or loss arising from the rent concessions.*

*New standards and amendment which are effective for the financial statements beginning on or after January 1, 2021, are as follows:*

- *PSAK No. 22 (Amendment 2019), regarding "Business Combination".*

*These amendments clarify the definition of business for the purpose of assisting the entity in determining whether a transaction should be accounted for as a business combination or an asset acquisition. In general, the amendments to PSAK No. 22 of these:*

- a. amend the definition of business.*
- b. added an optional concentration test that allows a simplified assessment of whether the acquired set of activities and assets is not a business.*
- c. clarified the business element that to be considered as a business, an integrated set of activities and assets acquired includes, as a minimum, substantive inputs and processes that together contribute significantly to the ability to produce outputs.*
- d. adds illustrative guidance and examples to help the entity assess whether substantive processes have been acquired.*

- *Amendments to PSAK No. 71, Amendments to PSAK No. 55, Amendments to PSAK No. 60, Amendments to PSAK No. 62 and Amendments to PSAK No. 73 regarding Interest Rate Reference Reform - Phase 2 is adopted from IFRS concerning Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.*

*The interest rate reference reform refers to the global reform which agrees to replace IBOR with an alternative interest rate reference, the replacement of IBOR is divided into two stages:*

- 1. Stage 1 (Pre-replacement issues).*
- 2. Stage 2 (Replacement issues).*

**30. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (LANJUTAN)**

- PSAK No. 110, mengenai "Akuntansi Sukuk" dan PSAK No. 111, mengenai "Akuntansi Wa'd" (Amandemen 2020), mengenai "Kombinasi Bisnis".

Penyesuaian ini memberikan klarifikasi saat pengakuan awal dari investasi pada sukuk. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menjaga konsistensi pengaturan untuk perolehan sukuk. Penyesuaian terhadap PSAK No. 110 berdampak pada PSAK No. 111: Akuntansi Wa'd yang merujuk pada PSAK No. 110.

- PSAK No. 112, mengenai "Akuntansi Wakaf".

Secara umum PSAK No. 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh *nazhir* maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK No. 112 dapat juga diterapkan oleh *nazhir* perorangan.

Amandemen dan penyesuaian tahunan standar yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 22 (Amandemen 2020), mengenai "Kombinasi Bisnis terhadap referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan".

Amandemen PSAK No. 22 ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Amandemen ini menambahkan deskripsi mengenai liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK No. 30, serta mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi, dan terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

- PSAK No. 57 (Amandemen 2019), mengenai "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak".

Amandemen ini mengklasifikasikan biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amandemen ini mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung terdiri dari: biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

- PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), mengenai "Agrikultur".

Penyesuaian ini mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen", menjadi "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen".

**30. FINANCIAL ACCOUNTING STANDART ANDREVISED (CONTINUED)**

- PSAK No. 110, regarding "Accounting for Sukuk" and PSAK No. 111, regarding "Wa'd Accounting" (Amendment 2020), regarding "Business Combinations".

*This adjustment provides clarification on the initial recognition of an investment in a sukuk. This adjustment aims to harmonize and maintain consistency of arrangements for the acquisition of sukuk. Adjustments to PSAK No. 110 has an impact on PSAK No. 111: Wa'd Accounting which refers to PSAK No. 110.*

- PSAK No. 112, regarding "Wakaf Accounting".

*In general, PSAK No. 112 regulates the accounting treatment of waqf transactions carried out by both nazhir and wakif in the form of organizations and legal entities. PSAK No. 112 can also be applied by individual nazhir.*

*The standard annual amendments and adjustments that are effective for financial statements beginning on or after January 1, 2022 are as follows:*

- PSAK No. 22 (Amendment 2020), regarding "Business Combinations against references to the Financial Reporting Conceptual Framework".

*Amendments to PSAK No. This 22 clarifies the interaction between PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.*

*This amendment adds a description of the liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK No. 57 or ISAK No. 30, and clarify the contingent liabilities recognized at the acquisition date, and in relation to the definition of a contingent asset and its accounting treatment.*

- PSAK No. 57 (Amendment 2019), regarding "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Contract Loss - Contract Fulfillment Costs".

*This amendment classifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is an burdensome contract. This amendment provides that the cost of fulfilling the contract consists of costs that are directly related to the contract. Directly related costs consist of: incremental costs to fulfill the contract and allocations of other costs that are directly related to fulfilling the contract.*

- PSAK No. 69 (Improvement 2020), regarding "Agriculture".

*This improvement clarifies the recognition and measurement that previously "the entity does not take into account cash flows for financing assets, taxation or regeneration of biological assets after harvest", to "the entity does not account for cash flows for financing assets, or regrowth of biological assets after harvest".*

**30. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (LANJUTAN)**

- PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), mengenai "Instrumen Keuangan".

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh pemegang terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima, pemegang hanya memasukkan fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara pemegang dan pemberi pinjaman, termasuk fee (imbalan) yang dibayar atau diterima baik pemegang atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

- PSAK No. 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), mengenai "Sewa".

PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

Amandemen standar yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Amandemen 2020), mengenai "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang".

Amandemen PSAK No. 1 ini diadopsi dari Amandemen IAS No. 1: *Presentation of Financial Statements*. Amandemen tersebut mengklarifikasi salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang yaitu mensyaratkan entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan.

Amandemen tersebut juga terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;
- mengklarifikasi bahwa klasifikasi tidak terpengaruh oleh niat atau harapan manajemen tentang apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas;
- mengklarifikasi bagaimana kondisi pinjaman mempengaruhi klasifikasi dan
- memperjelas persyaratan untuk entitas mengklasifikasikan liabilitas berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri.

Standar baru yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

**30. FINANCIAL ACCOUNTING STANDART ANDREVISIED (CONTINUED)**

- PSAK No. 71 (Improvement 2020), regarding "Financial Instruments".

PSAK No. 71 (Improvement 2020) clarifies fees (benefits) recognized by borrowers in relation to derecognition of financial liabilities. In determining the fee (return) to be paid after deducting the fee (return) received, the borrower only includes the fees (benefits) paid or received between the borrower and the lender, including fees (benefits) paid or received by either the borrower or the lender on behalf of other parties.

- PSAK No. 73 (Annual Improvement 2020), regarding "Leases".

PSAK No. 73 (Improvement 2020) clarifies the measurement by tenants and records changes in lease term related to "improvements to rental property".

The amended standards which became effective for financial statements beginning on or after January 1, 2023 are as follows:

- PSAK No. 1 (Amendment 2020), regarding "Presentation of Financial Statements concerning Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term".

Amendments to PSAK No. 1 was adopted from the IAS Amendment No. 1: *Presentation of Financial Statements*. The amendments clarify one of the criteria for classifying a liability as long-term, that is, it requires the entity to have the right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

The amendments also relate to the following:

- specifies that the entity's right to defer settlement of the liability must exist at the end of the reporting period;
- clarify that the classification is not affected by management's intentions or expectations of whether the entity will exercise its right to suspend settlement of the liability;
- clarify how loan conditions affect classification and
- clarify the requirements for an entity to classify a liability based on its ability to settle the liability by issuing its own equity instruments.

New standards which is effective for financial statements beginning on or after January 1, 2025 and early adoption is permitted as follows:

**30. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (LANJUTAN)**

- PSAK No. 74, mengenai "Kontrak Asuransi".

PSAK No. 74 merupakan adopsi dari IFRS No. 17: *Insurance Contract* yang berlaku efektif 1 Januari 2023. PSAK No. 74 ini telah mencakup relaksasi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Amandemen IFRS No. 17: *Insurance Contract* yang antara lain memberikan penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi.

Penerapan PSAK No. 74 Kontrak Asuransi akan membuat Laporan Keuangan perusahaan asuransi menjadi "berdayabanding" (*comparable*) dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK No. 62 Kontrak Asuransi yang berlaku saat ini (adopsi dari IFRS No. 4) masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/negara. Selain itu, PSAK No. 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

Manajemen Entitas sedang mengevaluasi dampak dari standar baru, amandemen, dan penyesuaian standar ini terhadap laporan keuangan.

**34. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan yang telah diselesaikan pada tanggal 02 Maret 2023.

**30. FINANCIAL ACCOUNTING STANDART ANDREVISED (CONTINUED)**

- *PSAK No. 74, regarding "Insurance Contracts".*

*PSAK No. 74 is an adoption of IFRS No. 17: Insurance Contract effective January 1, 2023. PSAK No. 74 has included relaxation of several provisions as regulated in Amendments to IFRS No. 17: Insurance Contract which, amongst others, provides for additional scope exceptions, adjustments in the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions.*

*Implementation of PSAK No. 74 The Insurance Contract will make the insurance company's Financial Statements "comparable" with other industries such as banking and other financial service companies due to PSAK No. 62 The current Insurance Contract (adoption of IFRS No. 4) still allows for varying reporting in each jurisdiction/country. In addition, PSAK No. 74 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and income from investment activities so that all stakeholders of the financial statements, including policyholders and investors, receive transparent information on the financial statements of companies that have insurance contracts for protection products. insurance with investment features.*

*The management of the Entity is currently evaluating the impact of the new standards, amendments and improvements to standards on the financial statements.*

**34. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

*The management of the Entity is responsible for the preparation of the financial statements which were completed on March 02, 2023.*